



**EXECUTIVE SUMMARY**  
**LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN PROFESIONAL**  
**TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)**  
**KABUPATEN/KOTA**

**PUSAT KURIKULUM**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**2007**

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN LHOKSEUMAWE (01)

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor ..... Puskur melakukan pemberdayaan TPK kabupaten dengan memberikan layanan profesionalisme agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan di wilayahnya dalam mengembangkan, memverifikasi, dan melakukan monitoring evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerah Pacitan, Jawa timur, dalam mengembangkan KTSP dan (2) membuat contoh-contoh KTSP.

Peserta kegiatan ini mencakup peserta dari Dinas pendidikan, kepala dan guru dari SD, SMP, SMA, SMK, kepala atau guru dari lembaga kelompok bermain, Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal. Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh peserta dari TPA tetapi TPA ini adalah merupakan lembaga Taman pembelajaran Al Qur'an bukan lembaga Taman Penitipan Anak.

Pemaparan materi dan workshop merupakan ruang lingkup dari kegiatan ini. Materi yang dipaparkan mencakup materi kebijakan pengembangan kurikulum, Konsep dasar KBK, Pengembangan KTSP, Silabus dan RPP, model-model Kurikulum yang mencakup model Muatan Lokal, pengembangan diri, pembelajaran tematik kelas awal SD, pembelajaran terpadu IPS dan IPS SMP/MTs, dan penilaian kelas. Sedangkan pada saat workshop peserta berlatih mengembangkan KTSP, silabus, RPP dan model-model yang disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip pengembangan KTSP.

Salah satu daerah pelaksanaan kegiatan ini adalah Kabupaten Lhokseumawe. Di Kab. Lhokseumawe belum dibentuk Tim Sosialisasi, namun sosialisasi yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah khususnya tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan telah dilakukan terhadap sebagian besar satuan pendidikan. Sosialisasi pada umumnya adalah yang berhubungan langsung dengan penyusunan KTSP serta perkiraan pelaksanaannya.

Implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan baru sampai pada tahap penyusunan KTSP, belum pada tahap pelaksanaan KTSP pada aktivitas nyata di sekolah. Sebagai gambaran, satuan pendidikan yang telah mengikuti sosialisasi sebagai berikut:

1. 90% SD dan SMP atau yang sederajat telah mengikuti sosialisasi. Dari jumlah tersebut 60 % sudah menyusun secara lengkap KTSP.
2. Sekolah Menengah berjumlah 48 buah. Dari jumlah tersebut 60 % telah mengikuti sosialisasi KTSP dan 30 % telah menyusun KTSP.

Akan tetapi, untuk PAUD agak berbeda karena belum ada aturan tentang pengembangan KTSP untuk PAUD, maka peserta dari PAUD belum ada yang mengembangkan KTSP PAUD.

Selama kegiatan bantuan profesional berlangsung, peran aktif pengawas cukup tinggi dan sebagian besar ikut serta pada kegiatan bantuan profesional ini. Mereka secara khusus membantu dalam memberikan bimbingan. Sebagian besar pengawas tampaknya menguasai materi pelajaran tertentu, namun penguasaan terhadap KTSP masih beragam. Penguasaan peserta (kepala sekolah pada sekolah menengah) tidak merata, namun pada umumnya para kepala sekolah berpartisipasi secara aktif. Kasi Kur Dikdas Kab Lhokseumawe memiliki penguasaan yang baik tentang KTSP.

Selain itu, muncul beberapa pertanyaan sehubungan dengan pengembangan KTSP yaitu (1) SMK ada 128 program pertanian belum ada SK dan KD nya ?, (2) Apa Puskur menyediakan program pertanian dan program produktif ?, (3) Mengapa SKBM sekarang menjadi KKM ?, (4) Bagaimana mengaitkan Visi, Misi, dan Tujuan dalam dokumen KTSP ?, (5) Apa persamaan dan perbedaan KBK dan KTSP ?, (6) Apakah SK dan KD tidak boleh berubah ?, (7) Mengapa kurikulum berubah, KBK menjadi KTSP ?, (8) SKBM kriterianya ada esensial, mengapa KKM tidak ada kriteria esensial ?, (9) SK dan KD tidak boleh berubah, indikator dikembangkan sekolah, dan bagaimana dengan UAN nya ?, (10) Apa bisa 1 orang guru mengajar semua mata pelajaran di IPA/IPS ?, (11) Apa pembuatan RPP itu 1 SK dan 1 KD saja ?, (12) Bagaimana mengisi raport untuk pengembangan diri ?, (13) Apakah KTSP itu harus lengkap semua silabus dan rpp semua mata pelajaran ?, (14) Sampai kapan berlakunya KTSP ?, (15) Bagaimana kalau tidak membuat silabus dan rpp dalam pembelajaran tematik karena sudah ada program tahunan dan semester ?, (16) Bagaimana penilaian potofolio ?, (17) Apakah kegiatan eksperimen dalam IPA dapat dilihat sebagai penilaian performance dan projek ?, (18) Karya tulis dan menyusun teks pidato bisa dimasukkan dalam portofolio ?, (19) Bagaimana dengan pembelajaran IPA Terpadu karena dalam 1 semester hanya biologi ?, (20) Apakah SDLB semua pembelajarannya tematik ?

Kegiatan pengembangan profesional di kabupaten lhokseumawe ini secara umum telah dapat mencapai segala hal yang menjadi harapan meskipun masih memerlukan penyempurnaan lagi. Menurut penjelasan Kasikur di kab. Lhokseumawe, penyusunan KTSP dilakukan dalam bentuk pertemuan di masing-masing satuan pendidikan. Masih adanya kendala dalam mensosialisasikannya disebabkan karena letak sekolah (khususnya sekolah menengah) yang umumnya sangat berjauhan dan sulit ditempuh. Kondisi perkembangan pendidikan untuk anak usia dini pada daerah ini agar bervariasi. Bagi lembaga KB, TK dan RA pada umumnya mereka telah terbiasa dalam mengembangkan persiapan pembelajaran yang diperlukan untuk keberlangsungan proses pembelajaran. Perencanaan yang dibuatnya mencakup perencanaan tahunan, semester dan silabus. Tetapi bagi TPA (Taman pembelajaran Al Qur'an) mereka tidak membuat perencanaan yang spesifik. Untuk menyiapkan peserta dalam rangka mengembangkan program pembelajaran maka dalam pertemuan ini dilakukan workshop yang dimulai dengan diskusi masalah dan hal-hal yang telah dilakukannya selama ini dalam rangka proses pembelajaran. Secara umum lembaga PAUD yang hadir telah mempunyai landasan sekolah yang mencakup visi dan misi serta tujuan dan perencanaan pembelajarannya. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini lebih diarahkan untuk mengelola informasi yang dimilikinya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bentuk program pembelajaran lembaga tersebut. Untuk kelompok TPA kegiatan ini menjadi pengalaman karena ada beberapa hal yang dapat dipelajarinya untuk memperbaiki perencanaan pembelajaran di TPA masing-masing.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KOTA TEBING TINGGI (02)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di Kota. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah mencanangkan untuk melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan mulai tahun pelajaran 2006/2007 mulai dari jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan prinsip “Melaksanakan seraya belajar melaksanakannya”.

Menurut Kepala Dinas KTSP bagaikan sebuah misteri. Untuk membuka misteri KTSP, pemerintah Kota Tebing Tinggi bekerja sama dengan pihak swasta mengundang nara sumber untuk melakukan pelatihan pengembangan KTSP. Hal ini merupakan salah satu cara dinas untuk membina kemitraan dengan stake holder baik institusi pemerintah maupun pihak swasta dalam memajukan pendidikan di wilayahnya.

Selain menggalang kemitraan dengan pihak terkait, dinas juga telah menganggarkan dana untuk pelatihan pengembangan KTSP baik berupa sosialisasi melalui MGMP atau dalam bentuk lainnya di tahun anggaran 2007. Pada tahun anggaran 2008 dinas juga telah menganggarkan melalui APBD kegiatan yang berkaitan dengan KTSP antara lain pelatihan para kepala sekolah, para pengawas dan pemberdayaan MGMP dan KKG. Dinas merasakan bahwa pemberdayaan KKG dan MGMP merupakan suatu kegiatan yang paling efektif untuk memberikan bekal kepada seluruh guru di wilayah dinas pendidikan karena yang langsung menyentuh seluruh guru adalah melalui forum

tersebut. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bahwa sekolah belum memahami tentang KTSP. Langkah ini ditempuh agar kualitas pendidikan di Kota Tebing Tinggi meningkat dengan signifikan .

Kota Tebing Tinggi memiliki dinas pendidikan yang memiliki visi yang baik tentang pendidikan. Motivasi dan usaha dari dinas sangat baik. Hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan KTSP yang telah dianggarkan pada tahun 2007. Hal tersebut menjadi dasar bagi dinas untuk menerapkan kebijakan bahwa pada tahun 2007 sekolah sudah harus menyusun seluruh komponen KTSP agar paling lambat tahun 2008 seluruh sekolah dapat melaksanakan KTSP dengan baik. Walaupun dalam proses pelaksanaan tetap harus selalu melakukan perubahan-perubahan dan revisi untuk lebih sempurnanya dokumen dan sekaligus pelaksanaannya.

Keseriusan dinas tentang pelaksanaan KTSP diwujudkan dengan telah dibentuknya Kota Tebing Tinggi telah menetapkan TPK dan dilegalisasi dengan SK Kepala Dinas Pendidikan. Untuk memperoleh SK Walikota, Kepala Dinas telah mengusulkan kepada Pemda tentang susunan TPK dan Program. Program yang diusulkan tentu berdampak pada pengalokasian dana Tim Pengembang Kurikulum yang akan mendampingi sekolah dalam menyusun KTSP.

Kedatangan petugas dari Puskur untuk melakukan kegiatan pelatihan ke kota Tebing Tinggi dirasakan sangat bermanfaat karena mereka merasakan sangat efektif. Mereka lebih memahami kebijakan KTSP. Kemampuan mereka cukup baik. Namun kemampuan TPK sangat bervariasi. Hal ini disebabkan karena belum seluruhnya memperoleh sosialisasi yang sama. Hal ini terlihat dari hasil workshop penyusunan KTSP. Akan tetapi mereka bersepakat untuk saling berbagi agar memiliki kemampuan yang sama. Walaupun demikian. Mereka masih perlu diberikan pemantapan lagi agar tingkat penguasaan menjadi sangat baik sehingga apabila terdapat masalah yang sangat detail dan teknis, mereka bisa menjawab persoalan tersebut. Walaupun belum sepenuhnya mampu untuk mendampingi sekolah, tetapi TPK inilah yang diandalkan oleh dinas untuk lebih mempercepat tingkat pemahaman para pelaksana pendidikan di daerah.

Kedatangan Puskur dirasakan sangat baik karena memberikan pemahaman mana yang harus dilakukan oleh daerah dan mana yang akan ditagih oleh Pemerintah dalam kaitannya dengan standar nasional pendidikan. Sehingga daerah menjadi leluasa mengembangkan apa yang dapat mereka laksanakan.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN REJANG LEBONG (03)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di kab. Rejang Lebong. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Dalam kegiatan ini disampaikan pemaparan materi dan workshop pengembangan contoh KTSP. Materi yang dipaparkan mencakup materi kebijakan pengembangan kurikulum, Konsep dasar KBK, Pengembangan KTSP, Silabus dan RPP, model-model Kurikulum yang mencakup model Muatan Lokal, pengembangan diri, pembelajaran tematik kelas awal SD, pembelajaran terpadu IPS dan IPS SMP/MTs, dan penilaian kelas. Sedangkan pada saat workshop peserta berlatih mengembangkan KTSP, silabus, RPP dan model-model yang disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip pengembangan KTSP.

Daerah kab. Rejang Lebong menyambut baik terhadap pelatihan yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum. Informasi dari pusat sangat diharapkan untuk menyamakan pemahaman tentang KTSP. Walaupun daerah ini sudah mulai melakukan sosialisasi di beberapa sekolah, namun pemahaman mereka terhadap KTSP cukup beragam, hal ini dikarenakan bahwa peserta yang ikut dalam pelatihan pada umumnya sudah pernah mengikuti pelatihan KTSP. Hal ini ditandai dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Misalnya, antara lain pertanyaan: "apa perbedaan antara KBK dengan KTS? Bahkan ditemukan guru yang belum mengetahui permen 22 tentang standar isi. Pada saat kehadiran tim Puskur, kepala Dinas belum mengeluarkan SK untuk pengembang

kurikulum di daerahnya, akan tetapi setelah pelatihan Dinas Dikjar akan membentuk tim pengembang dan sekaligus mengeluarkan SK bagi tim pengembang yang sudah terseleksi. Pelatihan yang dilakukan sebelumnya terbatas hanya pada MGMP.

Selain itu, diperoleh informasi bahwa Kepala Dinas segera mengalokasikan dana untuk sosialisasi KTSP ke berbagai sekolah di wilayahnya.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KOTA DUMAI (04)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Dumai dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kota Dumai dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di Kota Dumai. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Kota Dumai secara geografis memiliki posisi strategis karena terletak di pinggir pantai. Kota Dumai sangat dekat dengan Singapura dan Malalysia melalui pelabuhan laut yang oleh pemerintah daerah akan diperbesar menjadi pelabuhan internasional. Hal tersebut menjadi kelebihan Kota Dumai untuk lebih memajukan pendidikan mereka.

Selain Pelabuhan laut, Dumai merupakan penghasil minyak yang cukup melimpah. Minyak yang diasilkan oleh Dumai selain dari tambang, juga dari kelapa sawit yang telah diekspor ke luar negeri. Dengan kondisi seperti tersebut di atas, banyak pendatang yang menjadi penduduk kota tersebut. Adanya para pendatang menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi juga cukup baik.

Dinas pendidikan Kota Dumai juga berkeinginan agar sekolah menjadi tempat yang paling baik untuk mengembangkan kompetensi siswa agar dapat terserap ke dalam dunia kerja dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan keseriusan dinas pendidikan dengan mengganti para pejabat di dinas pendidikan dengan pejabat yang benar-benar memiliki potensi dan motivasi yang baik untuk kemajuan pendidikan.

Keseriusan lainnya adalah telah dianggarkannya pelatihan KTSP melalui APBD di mana pada tahun anggaran 2007. Pelatihan tersebut dimaksudkan agar seluruh

pelaksanaan pendidikan di sekolah memiliki pemahaman yang baik tentang KTSP yaitu di tingkat pengawas, kepala sekolah, dan guru.

Tim Pengembang Kurikulum daerah juga sudah terbentuk melalui SK Kepala Dinas dan akan ditindaklanjuti menjadi SK walikota. Tim tersebut sudah sangat baik dengan kemampuan yang memadai dan siap untuk diterjunkan ke sekolah untuk mendampingi mereka.

Selain dari anggaran APBD, dinas juga melakukan kerja sama dengan siapapun yang ingin memajukan pendidikan di daerahnya. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan tanggapan yang positif dengan adanya pelatihan-pelatihan yang melibatkan guru yang dilaksanakan oleh penerbit swasta. Sejalan tidak memberikan pemaksaan kepada sekolah, dinas memberikan peluang yang baik untuk melakukan hal tersebut.

Dengan adanya usaha yang baik dari dinas, tingkat pemahaman para peserta juga cukup baik. Sehingga kedatangan puskur memberikan pemahaman yang lebih memadai tentang pelaksanaan KTSP. Tingkat pemahaman yang tinggi ini juga diakibatkan telah dipahaminya dengan baik kebijakan KBK sebelum lahirnya Permendiknas no 22, 23, dan 24 tentang SI dan SKL.

Kegiatan berikutnya apabila masih memungkinkan untuk dilaksanakan di Dumai, diharapkan lebih kepada monitoring dan pemantapan penguasaan kepada sekolah tentang KTSP. Hal tersebut sangat perlu karena dengan berjalannya kegiatan TPK di daerah, pasti akan dihadapi suatu persoalan yang berasal dari sekolah dan akan memberikan input yang baik terhadap kebijakan selanjutnya tentang kekurangan dan kelebihan untuk penguatan dari pelaksanaan SI dan SNP lainnya.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME TPK KAB/KOTA  
TAHUN 2007 DI KOTA BUKIT TINGGI (05)

TPK Kota Bukit tinggi telah terbentuk dengan SK Kepala Dinas Pendidikan, namun belum disusulkan kepada Walikota. Dinas pendidikan Kota Bukit Tinggi belum memiliki anggaran dalam persiapan pelaksanaan KTSP. Pelatihan yang telah diperoleh para pelaksanaan pendidikan di kota Bukit Tinggi karena diundang oleh provinsi maupun dari pusat. Selain itu juga sosialisasi diperoleh ketika ada pelatihan dalam kaitannya dengan pengembangan mata pelajaran. Khusus mata pelajaran pendidikan jasmani mereka merasa sangat jarang memperolehnya.

Sejak keluarnya Permendiknas No. 22, 23, dan 24 tahun 2006, seluruh satuan pendidikan di Kota Bukit Tinggi berkomitmen untuk mulai melaksanakan KTSP pada tahun yang sama. Sekolah yang telah melaksanakan kurikulum 2004, akan melaksanakan KTSP pada seluruh kelas. Walaupun mereka mengakui bahwa penguasaan penyusunan KTSP belum maksimal, namun mereka tetap melaksanakannya dan akan melakukan perbaikan-perbaikan jika diperlukan. KTSP yang disusun oleh Sekolah dan Komite Sekolah, masih belum begitu sempurna, akan tetapi komite sekolah dan perguruan tinggi mendorong agar KTSP dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. KTSP yang dimiliki sekolah-sekolah tersebut belum disahkan oleh kepala sekolah dan belum dilaporkan kepada kepala dinas pendidikan. KTSP yang disusun baru akan ditandatangani oleh Kepala Dinas dalam waktu yang tidak lama sebagai tanda bahwa akan dilaksanakannya KTSP pada masing-masing satuan pendidikan. Pada KTSP yang disusun belum seluruhnya mencantumkan seperti pada model kurikulum yang disajikan, misalnya belum mencantumkan KKM sekolah, KKM mata pelajaran, kriteria kenaikan kelas, dan kriteria penjurusan untuk SMA.

Muatan lokal masih belum disusun berdasarkan kriteria yang diberikan, yaitu kebutuhan daerah dan kondisi/potensi daerah. Muatan lokal yang ada hanya terdiri dari bahasa daerah saja dan diajarkan pada setiap kelas dan jenjang, dimuali dari kelas I SD hingga SMA. Mereka belum memiliki pemahaman bahwa muatan lokal dapat diganti setiap semester. Muatan lokal belum disusun SK, KD, Silabus, dan RPPnya.

Pendidikan bermuatan *life skill* juga belum dipahami. Mereka kurang mengerti apa saja yang dimaksud dengan *life skill*. Hal tersebut menyebabkan mereka kesulitan dalam memasukkan *life skill* ke dalam silabus mereka. Panduan *life skill* juga mereka tidak memilikinya. Hal tersebut dikawatirkan apa yang diajarkan kurang bersentuhan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Guru masih belum memahami betul bahwa setiap mata pelajaran yang mereka ajarkan sangat erat dengan kehidupan mereka. Apa yang dipelajari siswa semestinya menjadi bekal hidup mereka ketika hidup di masyarakat atau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan KTSP masih perlu disiapkan dengan lebih baik. Misalnya bagaimana menyediakan sarana dan prasarana. Sekolah mampu menyediakan sarana dan prasarana, atau sebenarnya mereka memiliki sarana dan prasarana akan tetapi belum mengetahui bagaimana memanfaatkan sarana dan prasarana dengan baik. Selain itu, situasi sekolah dan situasi pembelajaran belum mereka pahami sebagai bagian dari KTSP.

*Action plan* disusun oleh setiap anggota tim. *Action Plan* yang disusun menunjukkan bahwa mereka berkeinginan untuk menularkan kepada teman-teman mereka yang berada di wilayah mereka apa yang telah mereka peroleh selama pelatihan. Misalnya akan disampaikan pada forum MGMP, MKS, dan juga di sekolah masing-masing. Hal tersebut menggembirakan bahwa apa yang telah disampaikan oleh petugas dari Puskur menjadi bekal mereka dalam menyusun KTSP. Dengan demikian maka akan dapat tersusun KTSP sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah.

Permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh para pelaksana pendidikan di Kota Bukit Tinggi antara lain: (1) menurut UU No. 14/2006 tentang Guru dan Dosen, pasal 24, guru harus mampu mencukupi minimal jam tatap muka 24 jam dan maksimal 40 jam perminggu. Hal tersebut menyebabkan para guru mengejar kriteria minimal jam tersebut. Mereka seharusnya dapat mengajar dengan baik sesuai dengan kompetensi yang dituntut, akan tetapi karena mengejar jumlah jam yang harus dicapai, maka mereka akhirnya banyak meninggalkan tugas-tugas mereka, Alternatif yang dilakukan antara lain: guru yang masih kekurangan menjadi guru tim teaching agar dapat memenuhi jumlah jam. Satu mata pelajaran diajarkan oleh dua guru yang semua dapat memperoleh jam mengajar; guru yang mengajar mata pelajaran muatan lokal kurang terakomodasi karena hanya 2 jam per minggu; guru yang kekurangan jam dapat memegang pengembangan diri, misal guru kimia boleh menjadi guru BK yang dilaksanakan secara terprogram sehingga jam tatap muka terpenuhi, walaupun yang datang ke klinik dalam satu hari hanya 1 atau 2 siswa. Selain itu juga dapat menjadipelatih bela diri atau kesenian, atau olimpiade sains, (2) IPA terpadu diajarkan oleh satu orang guru, akan tetapi pada uji sertifikasi menggunakan mata pelajaran Biologi atau Fisika. Hal tersebut tidak sesuai dengan kebijakan KTSP, (3) Format LHB sangat beragam, ada yang berbentuk lembaran atau dicetak. Pernah ada yang pindah ke kabupaten lain daerah tersebut tidak mau menerima LHB lembaran dan dikatakan bahwa LHB tersebut hanya main-main, (4) Penambahan 4 jam perminggu secara terstruktur telah dilaksanakan tapi untuk menambah jam minimal, di luar itu ada ekskul yang dapat digunakan untuk menambah jam, (5) Permendiknas tentang Ujian Nasional jika akan berubah sebaiknya jangan terlalu mendadak. Hal tersebut menyebabkan persiapan menjadi kurang sempurna.

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu disusunnya program TPK dan mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program tersebut agar sekolah memiliki kemampuan yang memadai dalam mengembangkan KTSP.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KOTA OGAN KOMERING ILIR (OKI) (06)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kab. OKI dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kab. OKI dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di kab. OKI. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Kabupaten OKI termasuk ke dalam Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi geografis berupa darat dengan banyak kebun dan hutan dengan ciri khas sungai-sungai yang besar. Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuk kabupaten yang anggaran daerah sangat terbatas karena kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya daerah sebagai pemasukan daerah.

Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum di Kab. OKI merupakan pelatihan pertama tentang pengembangan KTSP. Belum pernah diselenggarakan pelatihan sebelumnya. Hanya beberapa saja yang pernah memperoleh pelatihan tentang KTSP.

Dalam pelatihan ini diperoleh informasi bahwa tingkat pemahaman peserta sangat lemah walaupun pemahaman tentang konsep dasar KBK. Sosialisasi tentang KBK sebelum Permendiknas No. 22, 23, dan 24 tahun 2005 di OKI juga belum maksimal. Hal ini menyebabkan kemampuan TPK yang dilatih masih belum memadai. Kemampuan TPK dalam mengembangkan KTSP dituntut memiliki kemampuan yang memadai karena tugasnya adalah mendampingi satuan pendidikan dalam mengembangkan KTSP.

Dalam workshop pengembangan KTSP diperoleh informasi bahwa para peserta belum memperoleh dokumen Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Sekolah juga belum menerima dokumen tersebut. Peserta hanya membawa dokumen silabus dan RPP

yang disusun menggunakan dokumen kurikulum sebelum permendiknas tentang SI dan SKL dikeluarkan. Namun demikian peserta sangat antusias dalam mengikuti setiap sesi pelatihan.

Pelatihan yang dilakukan oleh Puskur dianggap oleh peserta sangat bermanfaat, mereka menerima peningkatan kompetensi yang sangat signifikan. Hal tersebut karena materi yang diberikan sangat komprehensif dari mulai dasar kebijakan, model-model, hingga mereka melakukan workshop penyusunan KTSP. Selain itu mereka memperoleh bahan berupa CD yang dapat mereka baca sebagai sumber referensi.

Pada saat dilangsungkannya pelatihan dari Puskur, Kabupaten OKI belum membentuk TPK. Namun setelah dilakukan rapat koordinasi antara Puskur dengan Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota daerah, rencana draf TPK telah disusun dan akan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Tindak lanjut kegiatan yaitu perlu dilakukan pelatihan yang lebih intensif agar kemampuan dan pemahaman TPK cukup memadai sehingga dapat mendampingi satuan pendidikan dalam mengembangkan KTSP. Pertanyaan yang muncul dalam kegiatan tersebut antara lain: (1) Dalam dokumen 1 KTSP, ada visi, misi, tujuan sekolah. Apa boleh ditambah dengan indikator?, (2) KTSP berlaku sampai kapan?, (3) Apa boleh dokumen 1 KTSP yg disahkan tanpa dokumen 2?, (4) Bagaimana pembelajaran IPA dan IPS terpadu?, (5) Bagaimana strategi mengajar IPA/IPS terpadu di SMP?, (5) Dalam jadwal pelajaran kelas 1 sampai 3, apakah ditulis tematik saja atau mata pelajarannya?, (6) Bagaimana mengenai rapor untuk 2007/2008?, (7) Bagaimana cara menyusun mulok?, (9) Apa mulok dapat berbeda setiap semester?, (10) Apa nama 8 standar?, (11) Pengembangan diri itu terdiri dari apa saja?, (12) Apakah tujuan pembelajaran bisa sama dengan indikator (dalam RPP)?

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KOTA METRO (07)

Pemberlakuan Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaa otonomi daerah terutama dalam pengelolaan pendidikan yang dari bersifat sentralistik ke desentralistik. Selain itu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22, 23, dan 24 tentang Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Pelaksanaan Standar Isi dan Kompetensi Lulusan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Menindaklanjuti surat Edaran Menteri No. 33/2006 butir 3 tentang pembentukan Tim Pengembang Kurikulum di tingkat kabupaten/kota dan Tugas Fungsi Pokok (Tupoksi) Puskur ....menuntut Puskur melakukan pemberdayaan TPK kabupaten dengan memberikan layanan profesionalisme agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan di wilayahnya dalam mengembangkan, memverifikasi, dan melakukan monitoring evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Kegiatan Pengembangan Profesionalisme TPK kab/kota yaitu menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, (2) contoh-contoh KTSP.

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pelatihan dan workshop pengembangan KTSP kepada TPK kab/kota yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Kepala dan Guru Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pemaparan materi dan workshop merupakan ruang lingkup dari kegiatan ini. Materi yang dipaparkan mencakup materi kebijakan pengembangan kurikulum, Konsep dasar KBK, Pengembangan KTSP, Silabus dan RPP, model-model Kurikulum yang mencakup model Muatan Lokal, pengembangan diri, pembelajaran tematik kelas awal SD, pembelajaran terpadu IPS dan IPS SMP/MTs, dan penilaian kelas. Sedangkan pada saat workshop peserta berlatih mengembangkan KTSP, silabus, RPP dan model-model yang disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip pengembangan KTSP.

Sehubungan dengan implementasi KTSP ini, Dinas Pendidikan Kota Metro melakukan kebijakan bahwa pada tahun ajaran 2007/2008 semua satuan pendidikan harus sudah memulai melaksanakannya. Untuk itu, pada bulan juli 2007 akan dilaksanakan sosialisasi kepada semua satuan pendidikan mengenai pengembangan KTSP.

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan diperoleh informasi bahwa secara umum saat ini pelaksanaan KTSP di Kota metro adalah sebagai berikut:

1. Untuk satuan pendidikan SD/MI belum ada yang melaksanakan KTSP
2. Untuk satuan pendidikan SMP/MTs ada dua SMP yang telah mulai melaksanakan KTSP.
3. Untuk satuan pendidikan SMA/MA telah ada dua SMA yang telah mulai melaksanakan KTSP, dan
4. Untuk satuan pendidikan SMK telah ada 2 sekolah yang telah mulai melaksanakan KTSP.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan yaitu percepatan pembentukan TPK dan menyiapkan program sehingga TPK dapat segera melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dan pelaksanaan KTSP menjadi lebih optimal.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME TPK KAB/KOTA  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN NATUNA (08)

Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten terkaya di Provinsi Kepulauan Riau dan anggaran pendidikan. Kabupaten Natuna memiliki karakteristik geografis kelautan terdiri lebih dari 200 pulau besar dan 350 pulau kecil, dan 12 pulau terluar. Wilayah Natuna dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pulau Ranai dan pulau-pulau di sekitarnya, dan Kepulauan Anambas dan serta pulau-pulau di sekitarnya. Jarak antara dua Pulau besar tersebut sangat jauh dan hanya dapat dilalui dengan kapal hanya satu kali dalam satu minggu waktu tempuh 18 jam. Letak kantor dinas pendidikan juga sangat jauh dari kota dan tidak ada angkutan umum menuju kantor dinas menjadi kendala jika akan mengundang guru-guru dari pulau-pulau yang jauh untuk mengikuti pelatihan. Jika pelatihan diselenggarakan selama dua hari, maka peserta dari pulau Anambas akan menghabiskan waktu selama lebih dari 14 hari karena jadwal kapal hanya satu minggu sekali.

Sekolah-sekolah juga berlokasi di antara pulau-pulau sehingga anak-anak yang akan berangkat ke sekolah, dijemput dengan angkutan khusus yang disebut dengan **bus air**. Bus air disediakan oleh pemerintah daerah untuk melayani siswa pulang pergi dari sekolah.

Dengan kondisi geografis seperti yang telah digambarkan, maka merupakan tantangan bagi Kabupaten Natuna untuk memajukan pendidikan di wilayahnya. Seluruh siswa dari SD hingga SMA dan sederajat tidak dipungut biaya apapun oleh sekolah. Bahkan untuk daerah pulau besar disediakan bus antar jemput sekolah dan di pulau disediakan bus air alias kapal dari kayu. Guru-guru juga telah dijanjikan insentif namun belum terealisasi.

Beruntung bahwa Kabupaten Natuna memiliki kekayaan alam berupa minyak bumi yang telah dimanfaatkan dengan baik dengan hadirnya beberapa perusahaan minyak yang mengebor minyak lepas pantai di daerah tersebut. Sehingga konsorsium perusahaan minyak tersebut juga memiliki andil yang cukup baik dalam memajukan pendidikan di wilayah tersebut. Akan tetapi wilayah layanan konsorsium lebih banyak dilakukan di Kepulauan Anambas. Dengan demikian masyarakat di Anambas memiliki kesempatan yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Sumbangan dari konsorsium berupa paket pelatihan untuk guru dengan fasilitator yang didatangkan dari Jakarta. Pusat Kurikulum pernah diberikan kesempatan tiga kali untuk memberikan pelatihan penyusunan KTSP di Kecamatan Siantan (dua tahap) dan Palmatak. Guru-guru yang masih D2 atau D3 juga disekolahkan dengan biasiswa. Siswa berprestasi diberikan biasiswa untuk melanjutkan jenjang S1 di Perguruan Tinggi di Jawa dan Sumatera. Diharapkan setelah mereka lulus akan diangkat menjadi guru di pulau sekitar Anambas. Buku siswa juga dibelikan secara Cuma-Cuma dengan judul buku diserahkan kepada Cabang Dinas Kecamatan. Masyarakatpun juga diberdayakan. Sekali-sekali didatangkan penyanyi dari Jakarta dan juga warga Anambas pentas seni tradisional di IKJ Jakarta.

Dengan kondisi geografis berupa kepulauan, maka menjadi tantangan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna. Anggaran Pendidikan sudah cukup tinggi. Akan tetapi keluhan dari para pelaksana pendidikan, tingginya dana tersebut belum begitu dirasakan

oleh guru walaupun sudah dirasakan bahwa siswa memperoleh kemudahan untuk mengikuti pendidikan.

Pada saat petugas Puskur melakukan pelatihan para pengembang kurikulum di Kabupaten Natuna, pemahaman peserta masih sangat rendah. Hal tersebut disebabkan oleh kendala geografis yang sangat jauh dari provinsi dan letak Kantor Cabang Dinas Kecamatan yang sangat jauh. Selain itu, dinas belum melakukan sosialisasi secara intensif ke sekolah-sekolah. Beberapa peserta pernah menerima sosialisasi diselenggarakan oleh Direktorat PMPTK yang datang ke kabupaten tersebut. Sebagian besar menerima informasi dari sanggar KKG atau MGMP. Informasi yang mereka peroleh juga belum menyeluruh. Sehingga kedatangan Tim Puskur sangat membantu meningkatkan pemahaman mereka secara signifikan karena seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan KTSP disampaikan kepada peserta yang selama pelatihan yang pernah mereka peroleh hanya sepinggal-sepinggal.

Sejauh ini dinas belum menganggarkan sosialisasi KTSP untuk seluruh sekolah di wilayah kabupaten tersebut. Hal tersebut disebabkan besarnya dana yang diperlukan untuk mendatangkan para peserta. Anggaran baru akan disiapkan untuk tahun anggaran 2008.

Tahun ajaran baru 2007 belum ditetapkan oleh dinas sebagai tahun pelaksanaan KTSP untuk seluruh sekolah. Belum ada informasi kapan sekolah harus melaksanakan KTSP untuk seluruh jenjang pendidikan.

Guru sebagian besar belum memahami adanya permendiknas No. 22, 23, dan 24 tahun 2006. Mereka telah menerima dokumen silabus tetapi edisi sebelum 2006 (sebelum Permendiknas dikeluarkan).

Kabupaten Natuna memiliki SMKN Kelautan dan perikanan yang didirikan atas prakarsa Departemen Kelautan dan Perikanan bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Sekolah tersebut merupakan *boarding school* yang didanai oleh pemda. Pada tahun 2005 oleh Departemen Kelautan dan Perikanan diserahkan sepenuhnya pengelolaannya kepada dinas pendidikan. Hal tersebut menyebabkan sekolah menjadi kurang terurus. Guru-guru yang awalnya berasal dari dinas kelautan dan perikanan, semakin berkurang. Bahan pembelajaran juga ada yang belum tersedia. Selain itu, sekolah terletak di atas gunung yang jauh dari laut dan aksesnya sulit karena terpencil.

Pelatihan di Kabupaten Natuna harus dilakukan secara pelan-pelan dengan memberikan penjelasan awal konsep KBK dan perangkat lainnya. Tingkat pemahaman mereka sangat rendah sekali karena mereka juga belum memperoleh pemahaman yang baik terhadap KBK sebelum lahirnya Permendiknas No. 22, 23, dan 24. Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna belum melakukan kegiatan pelatihan penyusunan KTSP.

Dengan kondisi tersebut, maka bekal para peserta untuk menjadi pendamping sekolah dalam menyusun KTSP masih sangat kurang. Workshop penyusunan KTSP pada kegiatan ini juga masih sangat awal, apalagi tidak adanya bahan tercetak yang mereka perlukan tidak tersedia.

Yang agak memprihatinkan dari para peserta yaitu kurangnya motivasi mereka untuk ikut aktif terlibat dalam pelatihan ini. Pada saat pelatihan berlangsung mereka lebih banyak berbicara sendiri dengan teman-teman mereka, walaupun sudah dilakukan dengan cara diskusi atau *active learning* agar melibatkan mereka. Seolah-olah terkesan bahwa mereka hanya cukup untuk mendengarkan saja sepiantas lalu, karena peserta juga tidak hanya sedikit yang menulis catatan penting tentang informasi yang diberikan.

Kurangnya keterlibatan tersebut kemungkinan disebabkan oleh dokumen yang tidak mereka miliki dan hanya melihat tampilan pada layar walaupun tampilan pada layar sangat jelas terbaca. Sehingga di kemudian hari, bahan dalam bentuk print out akan lebih membantu dari pada diberikan CD. Sebelum pelatihan mereka harus melakukan penggandaan terlebih dahulu agar peserta pelatihan memilikinya dan terlibat dalam sesi pelatihan dengan baik.

KTSP yang disusun selama berlangsungnya workshop masih sangat sederhana. Silabus sudah dimiliki oleh sebagian peserta, tetapi terdapat guru yang belum memiliki silabus. Silabus yang disusun sendiri belum mereka miliki, karena standar isi mereka belum pernah memperolehnya.

KTSP dokumen satu serta silabus dan RPP disusun ketika workshop. Akan tetapi mereka masih harus dibimbing secara pelan-pelan. Apa yang mereka peroleh selama pelatihan dan workshop yang dilakukan masih dalam taraf sosialisasi, belum sampai pada pemahaman sebagai seorang pendamping sekolah untuk menyusun KTSP.

Muatan lokal masih belum disusun berdasarkan kriteria yang diberikan, yaitu kebutuhan daerah dan kondisi/potensi daerah. Muatan lokal mereka yaitu bahasa Inggris dan Arab Melayu. Muatan lokal belum disusun SK, KD, Silabus, dan RPPnya. Menurut kondisi geografis kelautan, mestinya muatan lokalnya adalah kelautan atau kebaharian. Akan tetapi muatan lokal kelautan hanya dilakukan di sekolah tertentu yang berada di pulau-pulau kecil yang menjadi daerah binaan Departemen Kelautan dan Perikanan serta Coremap LIPI. Belum seluruh sekolah di Kabupaten Natuna memilih kelautan sebagai muatan lokal.

Pendidikan bermuatan *life skill* juga kurang dipahami. Mereka kurang mengerti apa saja yang dimaksud dengan *life skill*. Hal tersebut menyebabkan mereka kesulitan dalam memasukkan *life skill* ke dalam silabus mereka. Panduan *life skill* juga mereka tidak memilikinya. Hal tersebut dikawatirkan bahwa apa yang diajarkan kurang bersentuhan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Guru masih belum memahami betul bahwa setiap mata pelajaran yang mereka ajarkan sangat erat dengan kehidupan mereka. Apa yang dipelajari menjadi bekal hidup mereka ketika hidup di masyarakat atau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dinas pendidikan Kabupaten Natuna belum memiliki anggaran dalam persiapan pelaksanaan KTSP di kota tersebut. Pada saat pelatihan Dinas belum mengusulkan nama-nama para tim pengembang daerah akan tetapi mereka kemudian mengirimkan tembusan nama-nama TPK yang diusulkan kepada Bupati.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN BELITUNG (09)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kab. Belitung dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kab. Belitung dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di kab. Belitung. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung dan sekolah. Dengan demikian sumber daya yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung dan sekolah dapat dimanfaatkan secara efektif.

Berkenaan dengan itu, Kepala Dinas P & K Kab. Belitung dalam sambutannya, menyatakan bahwa pelaksanaan Bimbingan Bantuan Profesional yang bersertifikasi harus ditindaklanjuti oleh peserta dengan kewajiban sebagai fasilitator untuk mengimbaskan segala pengetahuan yang diperoleh kepada yang lainnya. Tindaklanjut berupa *action plan*, yaitu pengalokasian anggaran yang akan disalurkan untuk setiap jenjang, yaitu pada: (1) tingkat SD melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), (2) tingkat SMP/SMA/SMK melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Di samping itu juga, Dinas P & K Kab. Belitung melakukan koordinasi sehingga pada tahun 2008, untuk jenjang SD KTSP sudah bisa berjalan di kelas 1 dan 2, serta 4 dan 5. Sementara itu, untuk jenjang SMP dan SMA, KTSP sudah bisa berjalan di kelas 7 dan 10.

Mengenai pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, Dinas P & K bekerja sama dengan instansi yang berkompeten dalam kurikulum yang berciri khas daerah. Sebagai bagian dari program Coremap LIPI, Belitung merupakan salah satu daerah binaan mereka dalam pendidikan kelautan. Pendidikan Pesisir dan Laut Kita ini menjadi muatan lokal yang diajarkan di sekolah dari mulai SD hingga SMA. LIPI telah menyusun SK dan KD muatan lokal kelautan dari SD hingga SMA. Buku guru dan siswa juga telah dicetak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar, namun untuk tingkat SMP dan SMA sedang dalam penyusunan. Selanjutnya, setelah Bimbingan Bantuan Profesional ini, para peserta Dinas P & K Kab. Belitung sudah harus melakukan diseminasi pengembangan profesional pada alokasi waktu triwulan ke-2.

Dalam kegiatan masih terdapat beberapa pertanyaan yang dapat menggambarkan tingkat pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap kebijakan pelaksanaan KTSP. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain: (1). Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global apa dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran?, (2) KKM sekolah menuju ke kriteria ideal 7,5. Sekolah kami hanya 6, apa boleh?, (3) Bagaimana mengaitkan Visi, Misi, dan Tujuan dalam dokumen KTSP?, (4) Apa persamaan dan perbedaan KBK dan KTSP?, (5) Apakah SK dan KD tidak boleh berubah?, (6) SK dan KD tidak boleh berubah, indikator dikembangkan sekolah, dan bagaimana dengan UAN nya?, (7) Apa bisa 1 orang guru mengajar semua mata pelajaran di IPA/IPS?, (8) Apa pembuatan RPP itu 1 SK dan 1 KD saja?, (9) Bagaimana mengisi raport untuk pengembangan diri?, (10) Apakah KTSP itu harus lengkap semua silabus dan rpp semua mata pelajaran?, (11) Sampai kapan berlakunya KTSP?, (12) Apakah pembelajaran tematik harus mengaitkan semua mata pelajaran?, dan (13) Apakah SDLB semua pembelajarannya tematik?

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU (10)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di kab. Kepulauan Seribu. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Di kabupaten Kepulauan Seribu, SD akan melaksanakan KTSP untuk semua kelas pada tahun ajaran 2007/2008, SMP sudah melaksanakan KTSP pada tahun ajaran 2006/2007, SMA dan SMK akan melaksanakan pada tahun ajaran 2007/2008. Berbeda keadaan dengan jenjang yang lain, untuk PAUD di Kepulauan Seribu juga terjadi kesimpangsiuran tentang istilah PAUD di mana istilah tersebut hanya diperuntukkan untuk PAUD terutama jalur non formal. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini juga disampaikan mengenai pengertian PAUD sesuai dengan UUSPN

Peserta kegiatan di Kepulauan Seribu diikuti oleh unsur dari Dinas kabupaten, Pengawas, kepala sekolah, dan guru dari PAUD, Pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dalam kegiatan ini disampaikan pemaparan materi dan workshop pengembangan contoh KTSP. Materi yang dipaparkan mencakup materi kebijakan pengembangan kurikulum, Konsep dasar KBK, Pengembangan KTSP, Silabus dan RPP, model-model Kurikulum yang mencakup model Muatan Lokal, pengembangan diri, pembelajaran tematik kelas awal SD, pembelajaran terpadu IPS dan IPS SMP/MTs, dan penilaian kelas. Sedangkan pada saat workshop peserta berlatih mengembangkan KTSP, silabus,

RPP dan model-model yang disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip pengembangan KTSP.

Kegiatan pengembangan profesional di kabupaten Kepulauan Seribu ini secara umum telah dapat mencapai segala hal yang menjadi harapannya yakni seluruh peserta telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasar KTSP. Wujud nyata dari keberhasilan kegiatan ini yakni dapat dikembangkannya contoh model KTSP, silabus dan RPP-nya meskipun masih memerlukan penyempurnaan lagi. Untuk kelompok PAUD, pada umumnya peserta telah dapat mengembangkan silabus pembelajarannya tetapi untuk pengembangan program pembelajaran (kurikulum) peserta belum pernah mengembangkannya. Oleh karena itu, penekanan dalam pertemuan yang dilakukan adalah mendiskusikan mengenai cara dan prinsip-prinsip yang diperlukan dalam rangka mengembangkan program pembelajaran PAUD yang dilanjutkan dengan praktek membuat contoh program pembelajaran PAUD.

Selama ini belum pernah ada pelatihan yang menggabungkan antara guru PAUD formal (TK/RA) dan PAUD non formal. Mereka masing-masing bekerja dan mengadakan pelatihan sendiri-sendiri dengan dana swadaya. Namun, hubungan antara sesama guru PAUD formal dan non formal secara pribadi sangat baik tetapi dengan hubungan persekolahan seperti terjadi persaingan. Pengembangan Profesionalisme Pengembang Kurikulum PAUD dari Puskur ini merupakan yang pertama kalinya kegiatan pelatihan gabungan antara PAUD formal dan non formal. Perkumpulan PAUD yang ada di Kabupaten Barito Kuala adalah IGTK, KKG dan Himpaudi.

Kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan profesional di kabupaten Kepulauan Seribu secara umum telah berjalan dengan baik, peserta sangat aktif sehingga dapat menghasilkan contoh-contoh KTSP seperti yang diharapkan meskipun memerlukan penyempurnaan lagi.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN PANDEGLANG (11)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di kab. Pandeglang. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan KTSP, tetapi belum pernah mendapatkan arahan langsung dari pusat kurikulum. Oleh sebab itu, daerah ini sangat antusias sekali terhadap pelatihan yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum karena merasa mendapat perhatian dari Pusat. Meskipun demikian, bukan berarti mereka baru mengetahui adanya standar isi yang berdampak kepada KTSP, mereka telah memiliki KTSP. Artinya ketika Pusat Kurikulum menyelenggarakan kegiatan di Kabupaten tersebut, para guru, pengawas dan kepala sekolah di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengetahui dan menyusun KTSP mereka masing-masing

Di kabupaten Purworejo, SD akan melaksanakan KTSP untuk semua kelas pada tahun ajaran 2007/2008, SMP sudah melaksanakan KTSP pada tahun ajaran 2006/2007, SMA dan SMK akan melaksanakan pada tahun ajaran 2007/2008. Berbeda keadaan dengan jenjang yang lain, untuk PAUD di Purworejo juga terjadi kesimpangsiuran tentang istilah PAUD di mana istilah tersebut hanya diperuntukkan untuk PAUD terutama jalur non formal. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini juga disampaikan mengenai pengertian PAUD sesuai dengan UUSPN

Peserta kegiatan di Pandeglang diikuti oleh unsur dari Dinas kabupaten, Pengawas, kepala sekolah, dan guru dari PAUD, Pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dalam kegiatan ini disampaikan pemaparan materi dan workshop pengembangan contoh KTSP. Materi yang dipaparkan mencakup materi kebijakan pengembangan kurikulum, Konsep dasar KBK, Pengembangan KTSP, Silabus dan RPP, model-model Kurikulum yang mencakup model Muatan Lokal, pengembangan diri, pembelajaran tematik kelas awal SD, pembelajaran terpadu IPS dan IPS SMP/MTs, dan penilaian kelas. Sedangkan pada saat workshop peserta berlatih mengembangkan KTSP, silabus, RPP dan model-model yang disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip pengembangan KTSP.

Kegiatan pengembangan profesional di kabupaten Pandeglang ini secara umum telah dapat mencapai segala hal yang menjadi harapannya yakni seluruh peserta telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasar KTSP. Wujud nyata dari keberhasilan kegiatan ini yakni dapat dikembangkannya contoh model KTSP, silabus dan RPP-nya meskipun masih memerlukan penyempurnaan lagi. Untuk kelompok PAUD, pada umumnya peserta telah dapat mengembangkan silabus pembelajarannya tetapi untuk pengembangan program pembelajaran (kurikulum) peserta belum pernah mengembangkannya. Oleh karena itu, penekanan dalam pertemuan yang dilakukan adalah mendiskusikan mengenai cara dan prinsip-prinsip yang diperlukan dalam rangka mengembangkan program pembelajaran PAUD yang dilanjutkan dengan praktek membuat contoh program pembelajaran PAUD

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan diperoleh informasi bahwa secara umum para peserta masih mengalami kesulitan dalam menyusun salah satu bagian KTSP, yaitu silabus, khususnya pengembangan kegiatan pembelajaran, indikator, dan penilaian dari suatu Kemampuan Dasar yang ada dalam standar isi; khusus guru SMP mereka masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran terpadu terutama dalam mengatur pengajaran secara tim antara guru Fisika dan Biologi. Untuk Kelompok PAUD pada umumnya mereka telah dapat mengembangkan silabus (Satuan kegiatan harian) dan RPP (satuan kegiatan harian), akan tetapi dalam pengembangan dokumen I peserta PAUD belum pernah mengembangkannya.

Kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan profesional di kabupaten Pandeglang secara umum telah berjalan dengan baik, peserta sangat aktif sehingga dapat menghasilkan contoh-contoh KTSP seperti yang diharapkan meskipun memerlukan penyempurnaan lagi.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN BANTUL (12)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kab. Bantul dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kab. Bantul dan sekolah.

Semua bidang pendidikan ditempatkan pada rencana strategis yang pertama dan utama, bahwa pemerintah kabupaten Bantul dan DPRD secara bersama-sama telah melahirkan sebuah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di kabupaten Bantul. Perda tersebut disamping berfungsi sebagai payung hukum bidang pendidikan juga memiliki fungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka memberikan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan. Sebagai contoh program yang telah dilaksanakan adalah memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menempuh jenjang pendidikan S2 kurang lebih sebanyak 200 orang, serta dalam rangka memperoleh kualifikasi dan sertifikasi. Program tersebut dapat dikatakan sebagai upaya peningkatan SDM dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang pada akhirnya diharapkan lulusannya dapat berkompetensi secara maksimal baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.

Kebijakan di bidang pendidikan dasar misalnya mulai tahun 2005 telah dicanangkan agar semua siswa pendidikan dasar dapat melanjutkan pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK). Untuk mendukung program tersebut Pemerintah Daerah telah memprogramkan dalam usulan APBD I dan II, serta melalui anggaran APBN, dan mengajak masyarakat ikut bersama-sama mewujudkan kebijakan tersebut.

Di samping itu, melakukan rekonstruksi (recovery) pasca gempa 27 Mei 2006. Hal ini telah diupayakan dengan pemanfaatan dan sinergi bersama *outsourcing* baik dengan pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka mewujudkan rehalilitasi gedung-gedung sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK juga memberikan berbagai beasiswa kepada peserta didik. Selain itu, kebijakan pada sektor pendidikan non-formal termasuk PAUD, pengarusutamaan gender, pemuda dan olah raga, kebudayaan, dll.

Berkaitan dengan program-program yang telah disusun, Dinas Pendidikan telah menetapkan TPK Kabupaten yang dilegalkan melalui Surat Keputusan Bupati Bantul. Program TPK juga telah disusun dengan mengalokasikan dana untuk sosialisasi dan pendampingan KTSP.

Berkaitan dengan implementasi Permen No. 22, 23, dan 24, pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bantul menerapkan “teknik jemput bola” artinya bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun program-program yang diusulkan kepada pemerintah daerah dan DPRD agar bidang pendidikan menjadi program prioritas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Ada beberapa sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang telah menerapkan KTSP mulai tahun ajaran 2006/2007 terutama sekolah-sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah mandiri (unggulan). Kontribusi komite sekolah berkaitan penusunan dan pengembangan dengan KTSP masih kurang. Secara umum KTSP setiap jenjang pendidikan telah disusun, Namun baru beberapa sekolah yang menerapkannya

Rekomendasi terhadap pelaksanaan KTSP di Kab. Bantul antara lain: (1) agar pelaksanaan KTSP dapat berjalan sebagaimana harapan perlu ada evaluasi dari Pusat Kurikulum secara berkala, (2) TPK yang akan ditetapkan hendaknya terdiri atas orang-orang profesional di bidangnya dan dipilih berlandaskan objektivitas bukan berdasarkan kedekatan,(3) komite sekolah perlu diberikan informasi tentang wacana implementasi kurikulum baru yang disebut KTSP agar keterlibatan mereka dapat secara maksimal, (4) agar pelaksanaan Permen nomor 22, 23, dan 24 berjalan sesuai harapan, maka perlu dilakukan sosialisasi KTSP yang lebih merata kepada semua tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN PACITAN (13)

Pemberlakuan Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaa otonomi daerah terutama dalam pengelolaan pendidikan yang dari bersifat sentralistik ke desentralistik. Selain itu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum. Salah satu wujud dari manajemen tersebut, sekolah diberi wewenang menyusun kurikulum sendiri dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Selain itu, sesuai dengan tupoksi Pusat Kurikulum yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor... butir ... maka Pusat Kurikulum, Depdiknas, berkewajiban memberikan bantuan profesional, khususnya dalam pengembangan KTSP kepada tenaga daerah sehingga dapat melakukan pemberdayaan TPK kabupaten dengan memberikan layanan profesionalisme agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan di wilayahnya dalam mengembangkan, memverifikasi, dan melakukan monitoring evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kegiatan pengembangan profesionalisme pengembang Kurikulum merupakan bentuk pelatihan dan workshop yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum kepada pelaksana pendidikan di daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerah Pacitan, Jawa timur, dalam mengembangkan KTSP dan (2) membuat contoh-contoh KTSP.

Salah satu daerah pelaksanaan kegiatan ini adalah Pacitan. Pacitan merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Pacitan sangat antusias menyikapi diberlakukannya Permendiknas No. 22, 23 dan 24 tahun 2006, dan Pacitan telah merencanakan akan mulai melaksanakan aturan tersebut pada tahun pelajaran 2007/8. Pacitan sudah membentuk Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (TPK KTSP) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 421/390/408.37.04/2007 yang anggotanya meliputi unsur Dinas Pendidikan, Pengawas TK/SD, Pengawas SMP, Pengawas SMA, Pengawas SMK, Kepala Sekolah, Ketua/Pengurus MGMP, Ketua/Pengurus KKG, Guru Inti dan Kepala Sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan SMK. TPK terpilih bertugas antara lain (1) Merencanakan penyelenggaraan sosialisasi/Pelatihan KTSP sesuai dengan satuan pendidikannya, (2) Melaksanakan bimbingan penyusunan draft KTSP, asistensi review dan revisi draft KTSP yang disusun oleh satuan pendidikan sekolah; dan (3) Melaksanakan asistensi finalisasi dan evaluasi KTSP yang disusun oleh satuan pendidikan sekolah.

Daerah ini sangat antusias sekali terhadap pelatihan yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum karena merasa mendapat perhatian dari Pusat. Meskipun demikian, bukan berarti mereka baru mengetahui adanya standar isi yang berdampak kepada pengembangan KTSP, mereka telah memiliki rencana bahwa KTSP tinggal disahkan saja oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat. Artinya ketika Pusat Kurikulum

menyelenggarakan kegiatan di Kabupaten tersebut, para guru dan kepala sekolah di jenjang Pendidikan dasar dan Menengah telah mengetahui dan menyusun KTSP mereka masing-masing. Akan tetapi, untuk PAUD agak berbeda karena memang untuk PAUD belum ada aturan yang mengatur mengenai pengembangan program pembelajaran atau KTSP di PAUD. Mengingat bahwa pengembangan program pembelajaran PAUD memang diperlukan maka kegiatan pelatihan ini di Pacitan diarahkan untuk membahas dan membuat buram program pembelajaran untuk lembaga PAUD yang hadir. Di kabupaten ini terdapat lembaga PAUD baik untuk jalur non formal maupun formal. Lembaga paud jalur non formal yang berbentuk taman penitipan anak merupakan lembaga yang tidak begitu populer sehingga pada saat akan dilakukan pengembangan profesionalisme bagi para pengembang kurikulum untuk lembaga ini tidak ada yang mewakili. Oleh karena itu, kegiatan ini hanya diikuti oleh para kepala dan guru Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak.

Pemaparan materi dan workshop merupakan ruang lingkup dari kegiatan ini. Materi yang dipaparkan mencakup materi kebijakan pengembangan kurikulum, Konsep dasar KBK, Pengembangan KTSP, Silabus dan RPP, model-model Kurikulum yang mencakup model Muatan Lokal, pengembangan diri, pembelajaran tematik kelas awal SD, pembelajaran terpadu IPS dan IPS SMP/MTs, dan penilaian kelas. Sedangkan pada saat workshop peserta berlatih mengembangkan KTSP, silabus, RPP dan model-model yang disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip pengembangan KTSP.

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan diperoleh informasi bahwa secara umum para peserta masih mengalami kesulitan dalam menyusun salah satu bagian KTSP, yaitu silabus, khususnya pengembangan kegiatan pembelajaran, indikator, dan penilaian dari suatu Kemampuan Dasar yang ada dalam standar isi; khusus guru SMP mereka masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran terpadu terutama dalam mengatur pengajaran secara tim antara guru Fisika dan Biologi. Untuk Kelompok PAUD pada umumnya mereka telah dapat mengembangkan silabus (Satuan kegiatan harian) dan RPP (satuan kegiatan harian), akan tetapi dalam pengembangan dokumen I peserta PAUD belum pernah mengembangkannya.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN PURWOREJO (14)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di kab. Purworejo. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Kabupaten Purworejo telah melaksanakan KTSP, tetapi belum pernah mendapatkan arahan langsung dari pusat kurikulum. Oleh sebab itu, daerah ini sangat antusias sekali terhadap pelatihan yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum karena merasa mendapat perhatian dari Pusat. Meskipun demikian, bukan berarti mereka baru mengetahui adanya standar isi yang berdampak kepada KTSP, mereka telah memiliki KTSP. Artinya ketika Pusat Kurikulum menyelenggarakan kegiatan di Kabupaten tersebut, para guru, pengawas dan kepala sekolah di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengetahui dan menyusun KTSP mereka masing-masing

Di kabupaten Purworejo, SD akan melaksanakan KTSP untuk semua kelas pada tahun ajaran 2007/2008, SMP sudah melaksanakan KTSP pada tahun ajaran 2006/2007, SMA dan SMK akan melaksanakan pada tahun ajaran 2007/2008. berbeda keadaan dengan jenjang yang lain, untuk PAUD di Purworejo juga terjadi kesimpangsiuran tentang istilah PAUD di mana istilah tersebut hanya diperuntukkan untuk PAUD terutama jalur non formal. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini juga disampaikan mengenai pengertian PAUD sesuai dengan UUSPN

Peserta kegiatan di purworejo diikuti oleh unsur dari Dinas kabupaten, Pengawas, kepala sekolah, dan guru dari PAUD, Pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dalam kegiatan ini disampaikan pemaparan materi dan workshop pengembangan contoh KTSP. Materi yang dipaparkan mencakup materi kebijakan pengembangan kurikulum, Konsep dasar KBK, Pengembangan KTSP, Silabus dan RPP, model-model Kurikulum yang mencakup model Muatan Lokal, pengembangan diri, pembelajaran tematik kelas awal SD, pembelajaran terpadu IPS dan IPS SMP/MTs, dan penilaian kelas. Sedangkan pada saat workshop peserta berlatih mengembangkan KTSP, silabus, RPP dan model-model yang disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip pengembangan KTSP.

Kegiatan pengembangan profesional di kabupaten Purworejo ini secara umum telah dapat mencapai segala hal yang menjadi harapannya yakni seluruh peserta telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasar KTSP. Wujud nyata dari keberhasilan kegiatan ini yakni dapat dikembangkannya contoh model KTSP, silabus dan RPP-nya meskipun masih memerlukan penyempurnaan lagi. Untuk kelompok PAUD, pada umumnya peserta telah dapat mengembangkan silabus pembelajarannya tetapi untuk pengembangan program pembelajaran (kurikulum) peserta belum pernah mengembangkannya. Oleh karena itu, penekanan dalam pertemuan yang dilakukan adalah mendiskusikan mengenai cara dan prinsip-prinsip yang diperlukan dalam rangka mengembangkan program pembelajaran PAUD yang dilanjutkan dengan praktek membuat contoh program pembelajaran PAUD

Dalam pelaksanaan kegiatan ini berbagai pertanyaan diajukan para peserta, antara lain (1) Bagaimana dengan ijazah SD yang hanya satu model padahal di provinsi Jawa Tengah ada yang menggunakan kurikulum 1994, kurikulum 2004, dan KTSP. Karena di ijazahnya tertulis mata pelajaran IPS dan PKn, padahal di kurikulum 2004 tertulis PKPS?, (2) KTSP berlaku sampai kapan?, (3) Apa boleh dokumen 1 KTSP yg disahkan tanpa dokumen 2?, (4) Bagaimana pembelajaran IPA terpadu, karena dalam 1 semester hanya ada biologi atau fisika saja?, (5) Bagaimana strategi mengajar IPA/IPS terpadu di SMP?, (6) Dalam jadwal pelajaran kelas 1 sampai 3, apakah ditulis tematik saja atau mata pelajarannya?, (7) Bagaimana mengenai rapor untuk 2007/2008?, (8) Apakah puskur membuat program produktif, normatif, dan adaptif untuk SMK?, (9) Apakah IPS terpadu, sedangkan dalam SI masih terkotak-kotak ada mata pelajaran sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah?, (10) Apakah KTSP untuk SDLB A/B/D/E bisa jadi satu?, (11) Apakah ada perbedaan antara KTSP untuk SMPLB B yang normal dan yang di bawah rata-rata?

Kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan profesional di kabupaten Purworejo secara umum telah berjalan dengan baik, peserta sangat aktif sehingga dapat menghasilkan contoh-contoh KTSP seperti yang diharapkan meskipun memerlukan penyempurnaan lagi.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN KLUNGKUNG (15)

Klungkung merupakan kabupaten yang terletak di bagian timur Pulau Bali. Kabupaten Klungkung merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki wilayah yang berupa pulau, yaitu Pulau Nusa Penida. Pulau Nusa Penida dapat dijangkau dengan kapal penyeberangan selama setengah jam. Di Nusa Penida terdapat daerah yang terpencil karena terletak di daerah perbukitan. Hal tersebut yang menyebabkan kondisi sekolah di Kabupaten Klungkung sangat bervariasi.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor .... Puskur melakukan pemberdayaan TPK kabupaten dengan memberikan layanan profesionalisme agar mampu melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan di wilayahnya dalam mengembangkan, memverifikasi, dan melakukan monitoring evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Sejalan dengan rencana dari pemerintah kab. Klungkung bahwa pelaksanaan KTSP di kab. Klungkung akan dilaksanakan serentak pada tahun ajaran baru 2007/2008 baik untuk SD, SMP, dan SMA/SMK. Maka kedatangan Tim Puskur untuk melakukan kegiatan Pengembangan Profesionalisme TPK kab/kota yang bertujuan untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP menjadi tempat verifikasi dari pengetahuan yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Selain itu, pada saat pelaksanaan pelatihan, sekolah sudah menyusun KTSP baik dokumen I dan dokumen II, dan akan disempurnakan setelah memperoleh masukan-masukan berdasarkan hasil kegiatan ini.

Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung sedang menyiapkan tim pengembang. Pemerintah daerah baru menyiapkan nama-nama yang akan dipilih berdasarkan pelatihan yang diselenggarakan oleh Puskur. Akan tetapi tidak semua peserta yang terlibat akan menjadi TIM Pengembang Kurikulum di daerah. Selain menyiapkan tim pengembang, dinas pendidikan kabupaten Klungkung juga telah menganggarkan sosialisasi dan pendampingan di sekolah-sekolah untuk menyusun KTSP pada tahun 2007 ini.

Akan tetapi, dilihat dari persiapan sekolah dari peserta yang diundang, masih belum maksimal. Dokumen yang telah disiapkan dan dimiliki adalah dokumen silabus dan RPP, dokumen lain KTSP sebagai satu dokumen utuh belum mereka susun.

Dinas berencana untuk melakukan sosialisasi atau pelatihan untuk guru-guru yang berada di pulau. Sekolah-sekolah tersebut masih menggunakan kurikulum 1994 dan baru berencana untuk menyusun KTSP tetapi terkendala oleh minimnya pengetahuan mereka. Dana tersebut dialokasikan pada tahun anggaran 2007 ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dinas telah menganggarkan persiapan pelaksanaan KTSP di kabupaten Klungkung

Dalam kegiatan ini disampaikan pemaparan materi dan workshop pengembangan contoh KTSP. Materi yang dipaparkan mencakup materi kebijakan pengembangan kurikulum, Konsep dasar KBK, Pengembangan KTSP, Silabus dan RPP, model-model Kurikulum yang mencakup model Muatan Lokal, pengembangan diri, pembelajaran tematik kelas awal SD, pembelajaran terpadu IPS dan IPS SMP/MTs, dan penilaian kelas. Sedangkan pada saat workshop peserta berlatih mengembangkan KTSP, silabus, RPP dan model-model yang disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip pengembangan KTSP.

Berdasarkan hasil kegiatan, diperoleh informasi bahwa pemahaman peserta terhadap KTSP cukup baik, akan tetapi belum melakukan penyusunan KTSP secara utuh. Mereka hanya memiliki silabus dan RPP. Silabus dan RPP pendidikan menengah mereka miliki bukan dengan membuat sendiri, tetapi fotocopi dari silabus dan RPP yang dibuat oleh direktorat pendidikan menengah umum. Sekolah Menengah kejuruan juga sangat memerlukan pembinaan dari direktorat kejuruan karena mereka belum memiliki kompetensi bidang keahlian.

Untuk PAUD di Bali perkembangannya sangat pesat karena mereka mempunyai tenaga-tenaga yang profesional dan ada pertemuan rutin yang dihadiri oleh para kepala dan guru PAUD untuk membahas dan menginformasikan pengetahuan-pengetahuan baru yang diperoleh oleh satu atau dua orang kepala dan guru yang mengikuti atau diundang oleh direktorat terkait. Kondisi perkembangan PAUD pada umumnya peserta telah dapat mengembangkan silabus pembelajarannya tetapi untuk pengembangan program pembelajaran (kurikulum) peserta belum pernah mengembangkannya. Oleh karena itu, penekanan dalam pertemuan yang dilakukan adalah mendiskusikan mengenai cara dan prinsip-prinsip yang diperlukan dalam rangka mengembangkan program pembelajaran PAUD dan mengembangkan buram program pembelajaran PAUD.

Selain itu, muncul beberapa pertanyaan sehubungan dengan pengembangan KTSP yaitu (1) Dalam dokumen 1 KTSP, ada visi, misi, tujuan sekolah. Apa boleh ditambah dengan indikator?, (2) Dalam panduan yg dibuat direktorat dikmen, nonakademis digunakan untuk menetapkan KKM, apa maksudnya?, (3) KTSP berlaku sampai kapan?, (4) Apa boleh dokumen 1 KTSP yg disahkan tanpa dokumen 2?, (5) Bagaimana pembelajaran IPA terpadu, karena dalam 1 semester hanya ada biologi atau fisika saja?, (6) Bagaimana strategi mengajar IPA/IPS terpadu di SMP?, (7) Dalam jadwal pelajaran kelas 1 sampai 3, apakah ditulis tematik saja atau mata pelajarannya?, (8) Dalam RPP, apakah SK, KD dan indikator ditulis lagi?, (9) Bagaimana mengenai rapor untuk 2007/2008?, (10) Apakah puskur membuat program produktif untuk SMK?, (11) Apakah IPS terpadu, sedangkan dalam SI masih terkotak-kotak ada mata pelajaran sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah?, (12) Berapakah perbandingan yg ideal untuk seorang konselor dalam menangani peserta didik? Apakah 1:80 sesuai panduan direktorat dikmen?

Kegiatan pengembangan profesional di kabupaten Klungkung ini secara umum telah dapat mencapai segala hal yang menjadi harapan meskipun masih memerlukan penyempurnaan lagi.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (16)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di kab. Lombok Timur. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan KTSP, tetapi belum pernah mendapatkan arahan langsung dari pusat kurikulum. Oleh sebab itu, daerah ini sangat antusias sekali terhadap pelatihan yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum karena merasa mendapat perhatian dari Pusat. Meskipun demikian, bukan berarti mereka baru mengetahui adanya standar isi yang berdampak kepada KTSP, mereka telah memiliki KTSP. Artinya ketika Pusat Kurikulum menyelenggarakan kegiatan di Kabupaten tersebut, para guru, pengawas dan kepala sekolah di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengetahui dan menyusun KTSP mereka masing-masing

Berbeda keadaan dengan jenjang yang lain, untuk PAUD di Lombok Timur juga terjadi kesimpangsiuran tentang istilah PAUD di mana istilah tersebut hanya diperuntukkan untuk PAUD terutama jalur non formal. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini juga disampaikan mengenai pengertian PAUD sesuai dengan UUSPN.

Semangat para pendidik dan tutor PAUD dalam mengembangkan dan memajukan PAUD sangat besar, walau mereka masih sifatnya kerja sukarela dan perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten pun masih kurang. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah PAUD formal yaitu TK sebanyak 178 dan RA sebanyak 30, sedangkan jumlah PAUD non formal yaitu Kelompok Bermain dan Pos PAUD berjumlah 200 lebih. Walau dukungan

masyarakat dan bantuan pemerintah bagi pendidikan PAUD formal dan non formal masih kurang, tetapi semangat besar para guru/tutor PAUD formal dan non formal tetap berkobar. Mereka tetap berusaha memotivasi masyarakat atau ibu-ibu yang memiliki anak PAUD untuk mengirimkan anaknya mengikuti kegiatan di PAUD non formal.

Pelatihan-pelatihan pengembangan PAUD bagi guru-guru TK dan PAUD Non Formal biasanya diselenggarakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten dengan biaya swadaya dari guru-guru sendiri dengan nara sumber dari TK Pembina propinsi atau TK Pembina Kabupaten, sedangkan Dinas hanya sebagai nara sumber kebijakan saja. Materi Pelatihan umumnya tentang kurikulum 2004, pembelajaran aktif/PAKEM maupun tentang teknik-teknik menggambar, menyanyi atau hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran PAUD. Selama ini Dinas belum pernah memberikan pelatihan khusus untuk PAUD. Aktivitas tentang PAUD yang diberikan oleh Dinas berupa lomba kreatifitas TK (setiap tahun) untuk anak usia 4 – 6 tahun.

Kegiatan gugus TK di Lombok Timur berjalan aktif, walau tidak ada dana untuk gugus dari Dinas. Forum pembinaan keprofesionalan TK lainnya adalah IGTK dan KKKS. Adapun forum PAUD non formal adalah HIMPAUDI. Aktifitas kegiatan Himpaudi antara lain membahas tentang APE, silabus/model pembelajaran. RA juga memiliki gugus tetapi karena ada kendala jarak yang berjauhan maka RA lebih sering bergabung dengan IGTK.

Kegiatan pengembangan profesional di kabupaten Lombok Timur ini secara umum telah dapat mencapai segala hal yang menjadi harapannya yakni seluruh peserta telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasar KTSP. Wujud nyata dari keberhasilan kegiatan ini yakni dapat dikembangkannya contoh model KTSP, silabus dan RPP-nya meskipun masih memerlukan penyempurnaan lagi. Untuk kelompok PAUD, pada umumnya peserta telah dapat mengembangkan silabus pembelajarannya tetapi untuk pengembangan program pembelajaran (kurikulum) peserta belum pernah mengembangkannya. Oleh karena itu, penekanan dalam pertemuan yang dilakukan adalah mendiskusikan mengenai cara dan prinsip-prinsip yang diperlukan dalam rangka mengembangkan program pembelajaran PAUD yang dilanjutkan dengan praktek membuat contoh program pembelajaran PAUD

Kegiatan pelatihan dan workshop pengembangan profesional di kabupaten Lombok Timur secara umum telah berjalan dengan baik, peserta sangat aktif sehingga dapat menghasilkan contoh-contoh KTSP seperti yang diharapkan meskipun memerlukan penyempurnaan lagi.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN KUTAI TIMUR (18)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di Kab. Kutai Timur. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Kabupaten Kutai Timur memiliki satuan pendidikan yang mencakup: PAUD = 15 buah, TK = 84 buah, Sekolah Dasar = 165 buah (Negeri dan Swasta), SMP Negeri = 30 buah, SMP swasta = 21 buah, SMA Negeri = 12 buah dan SMK Negeri = 2 buah (bidang teknologi dan bidang jasa/ SMEA). Di Kutai Timur sejak tahun 2006 sudah dicanangkan untuk melakukan penyusunan KTSP, dan hingga tahun 2007 ini diharapkan seluruh sekolah telah tuntas dan memahami secara benar kebijakan dan dalam menyusun KTSP. Target ketuntasan di tahun 2007 diberikan pada wilayah kota, sedangkan tahun 2008 diharapkan seluruh Kab. Kutai Timur lengkap dengan dokumen-dokumen pendukungnya. KTSP yang telah ada di sekolah masih dimungkinkan untuk selalu direvisi. Sampai saat ini, baru satu sekolah yang sudah menyerahkan KTSP untuk disahkan yaitu dari SMPN-2.

Kutai Timur merupakan kabupaten pemekaran yang usianya baru 7 tahun. Kutai Timur memiliki keberuntungan Kepala Daerah yang berlatar belakang pendidikan, sehingga perhatian terhadap pendidikan cukup tinggi yakni menetapkan 20% dana APBD untuk pendidikan sejak tahun 2006. Tahun 2006 anggaran pendidikan Rp. 202 milyar, tahun 2007 Rp. 260 milyar. Oleh sebab itu Dinas Pendidikan harus secara tepat

mensikapinya. Untuk KTSP, Dinas Pendidikan telah membuat alokasi dana khusus untuk pengembangannya.

Wajib belajar di kabupaten berlaku selama 12 tahun, bukan 9 tahun sebagaimana yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini bukan berarti bahwa Kutai Timur ingin menyalahi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Artinya, Dana BOS dari pemerintah diperuntukkan bagi siswa SD dan SMP yang menggambarkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap wajib belajar 9 tahun. Dana BOS Daerah (BOSDA) bagi siswa TK sampai dengan Sekolah Menengah dengan rincian: TK = 20.000 / siswa, SD = 25.000 / siswa, SMP = 35.000 / siswa, SMA = 85.000 / siswa, SMK = 100.000 / siswa, dan PT ada dua buah yang mahasiswanya dibebaskan dari biaya. PT yang menerima bantuan dana yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian, dan Sekolah Tinggi Agama Islam, masing-masing menerima Rp. 4 milyar/ tahun.

Beberapa pembinaan yang ditetapkan bagi pendidikan di Kutai Timur antara lain: (1) Bantuan dana yang diberikan kepada SMP dan SMA negeri yakni 40 juta – 100 juta bergantung kepada kondisi sekolah. Dana tersebut untuk operasional sekolah, (2) Guru di sekolah mendapatkan insentif guru negeri dan swasta sebanyak Rp. 800.000 – Rp. 1200.000 berdasarkan uji kompetensi dan jarak (tingkat keterpencilan), (3) Kepala sekolah mendapatkan tunjangan kepala sekolah dari dinas Pendidikan. Terdapat 14 sekolah yang memperoleh mobil operasional berdasarkan prestasi yang dijangkau sekolah, (4) Bagi siswa yang berhasil masuk tim olimpiade akan mendapatkan beasiswa sampai S-3, (5) Bagi siswa yang NEM nya masuk 10 besar sekolah berdasarkan proporsi akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2,5 juta, (6) Kepala sekolah ditetapkan berdasarkan hasil tes kepala sekolah. Guru meskipun masih muda sudah dipebolehkan mengikuti tes untuk kepala sekolah. Bagi guru yang memenuhi persyaratan maka guru tersebut masuk pada daftar tunggu untuk menjadi kepala sekolah. Nanti bila ada penggantian kepala sekolah, maka yang akan ditunjuk adalah guru yang masuk ke dalam daftar tunggu kepala sekolah, (7) Kutai Timur memiliki perpustakaan sebanyak 1 buah, masing-masing kecamatan memiliki 10 buah perpustakaan meskipun baru mencakup 10 kecamatan sedangkan 8 kecamatan lagi belum ada perpustakaan.

Kabupaten Kutai Timur telah memiliki TPK yang disahkan dengan SK kepala dinas pendidikan. Mereka juga telah memiliki program di tahun 2007 dan 2008 untuk sosialisasi dan pendampingan KTSP yang akan dilakukan terhadap KKG/MGMP, MKKS/MKS, dan juga satuan pendidikan perjenjang. Kemampuan mereka walaupun belum merata, namun sudah cukup memadai untuk mendampingi satuan pendidikan. Namun demikian, masih harus terus berlatih dan mempelajari bagaimana kebijakan KTSP dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh TPK secara proaktif baik mempelajarinya sendiri atau mencari informasi dari berbagai sumber.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN POLIWALI MANDAR (19)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali mandar dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di kab. Polewali Mandar. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Kegiatan bantuan profesional di Polewali Mandar dilakukan dalam rangka memberikan bantuan pada orang-orang yang diharapkan akan menularkan kembali pada peserta guru yang menyebar diseluruh kabupaten Poliwali, Provinsi Sulawesi Barat yang belum pernah mendapatkan informasi tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) . Sejauh ini pemahaman KTSP menurut pandangan Kepala Dinas Pendidikan Poliwali beragam. Dalam pelatihan ini pihak dinas mengharapkan tidak timbul kesimpangsiuran lagi tentang KTSP itu. Pada saat yang sama di Polman ada kegiatan Pekan Olah Raga Daerah Pertama di Sulawesi Barat dari tanggal 16 sampai dengan 23 Juli 2007, sehingga pelaksanaan Banprof berjalan paralel dengan Porda. Kegiatan Porda ini banyak melibatkan pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan, sehingga beberapa peserta dari dinas tidak dapat mengikuti sepenuhnya kegiatan ini. Namun demikian komposisi peserta yang mengikuti kegiatan ini 47 orang dari guru-guru, kepala sekolah , pegawai dari SD, SMP, SMA , SMK dan SLB maupun SMPLB dan 13 orang peserta dari pihak dinas berperan sebagai panitia dan peserta juga. Dalam kegiatan in semua peserta menunjukkan minat yang besar dalam mengikutinya.

Kepala dinas Poliwali menyambut baik dengan bantuan yang diberikan Puskur pada dinas pendidikan kabupaten Poliwali. Kerja sama ini diharapkan akan terus berlanjut dari

waktu ke waktu. Kepala Dinas Poliwalipun mengharapkan peluang kerjasama dengan Pusat kurikulum dalam aspek-aspek pendidikan yang lain dan akan sangat menyambut baik kerja sama itu jika ada lagi. Pernyataan ini diulang pada saat pembukaan maupun penutupannya. Dalam kaitannya dengan KTSP Kebijakan Kepala dinas ialah akan meminta stafnya untuk menindaklanjuti kegiatan pelatihan ini. Beberapa peserta yang berpotensi akan ditunjuk dan ditetapkan untuk menyebarkan pelaksanaan KTSP dan pembinaan di sekolah-sekolah. Kegiatan penyebaran ini akan dipantau terus menerus oleh kepala dinas dalam pelaksanaannya sehingga akan diketahui berapa sekolah yang akan dan telah mendapat sosialisasi KTSP, serta sejauh apa KTSP dapat diterapkan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pelaksanaan dilakukan dengan melakukan pengaturan waktu, materi dengan pihak dinas pendidikan dilanjutkan dengan penyajian kajian-kajian KTSP yang belum dipahami. Penyesuaian persepsi tentang maksud latihan dan target latihan dibicarakan dalam perencanaan pelaksanaan tersebut bersama aparat Dinas Pendidikan. Penyajian kajian KTSP dilakukan dengan membuka peluang diskusi bagi peserta dengan Puskur. Pada pelaksanaannya didahului dengan penjelasan umum serta diskusi yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tugas masing-masing peserta dilanjutkan dengan kerja individual dan kerja kelompok. Peserta dimungkinkan mengembangkan model-model program yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan daerah melalui kreasi mereka dan melakukan modifikasi. Guna mengembangkan pola berpikir peserta diminta mengembangkan dari apa yang ada pada rambu-rambu, kemudian setelah itu diberikan contoh-contoh yang dibuat oleh pusat kurikulum. Permasalahan-permasalahan yang bersifat lokal diminta untuk menjadi perhatian para petatar agar jika permasalahan yang sama muncul akan dapat dijawab oleh petara secara proporsional.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan wawasan tentang Peraturan pemerintah yang dijabarkan dalam keijakan-kebijakan oprasional dan rambu-rambu. Selanjutnya Rambu-rambu itu dicoba oleh peserta untuk disusun dan dikembangkan dalam KTSP dan komponen-komponennya. Kegiatan pelatihan bagi calon penatar dilakukan dengan membagi pekerjaan dengan menyusun KTSP pada kelompok, maupun individu sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Diupayakan setiap sekolah melakukan penyusunan KTSP sesuai dengan visi dan misi serta harapan sekolah berupa penjabaran tujuan yang sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Tim Pusat Kurikulum melakukan bimbingan kelompok maupun individu dalam kelompok-kelompok sekolah. Pelaksanaan ini dapat lebih menjawab permasalahan lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberi fokus yang berbeda-beda dari satu jenjang & jenis pendidikan ke jenjang & jenis pendidikan yang lain.

Beberapa pertanyaan yang mengemuka dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Apakah muatan lokal dilakukan boleh secara terus menerus dua semester atau satu semester saja?
2. Apakah program SKS merupakan wacana saja atau akan ada beneran?
3. Bagaimana dengan kedudukan program akselerasi itu dikaitkan dengan SKS?
4. Apakah Visi dan misi dari suatu sekolah dapat berubah ?
5. Apakah boleh MGMP menyusun KTSP?
6. Beban mengajar, apakah 24 jam perminggu sudah harus diterapkan?
7. Pemahaman materi minimal kompetensi kelulusan minimal?

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN MALUKU TENGAH (20)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di kab. Maluku Tengah. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Berdasarkan hasil kegiatan diperoleh informasi bahwa Pada saat ini pelaksanaan KTSP untuk satuan pendidikan SD/MI di Kab. Maluku Tengah masih sebagian kecil dan untuk Untuk satuan pendidikan SMP/MTs ada tiga SMP yang telah mulai melaksanakan KTSP

Selain itu, Perkembangan Pendidikan PAUD di Maluku Tengah cukup baik dalam arti jumlah pendidikan PAUD formal dan non formal cukup banyak. PAUD non formal yang ada di kabupaten maluku tengah sangat lengkap yaitu KB, TPA dan Pos PAUD. Semangat para pendidik dan tutor PAUD dalam mengembangkan dan memajukan PAUD sangat besar, walau mereka masih sifatnya kerja sukarela. Pemerintahpun melalui Direktorat PAUD telah memberikan bantuan dana untuk PAUD non formal sebesar Rp.20 juta di tahun 2006. Akan tetapi, para praktisi PAUD non formal dan TK belum terjalin kerjasama yang baik. Dilapangan masih sering terjadi pergesekan antara PAUD non formal dan TK. Selama ini antara PAUD non formal dan TK belum pernah duduk bersama dalam menjalin kerjasama. Pelatihan pengembangan profesionalisme pengembang kurikulum PAUD inilah merupakan awal jalinan kerjasama. Selama ini praktisi PAUD non formal dan TK terjalin hubungan karena hubungan baik antar personal saja, bukan lembaga/institusi.

Selama ini belum pernah ada pelatihan yang menggabungkan antara guru PAUD formal (TK/RA) dan PAUD non formal. Mereka masing-masing bekerja dan mengadakan pelatihan sendiri-sendiri dengan dana swadaya. Pelatihan-pelatihan pengembangan PAUD dari Diknas Pusat bagi guru-guru TK dan PAUD non formal masih sangat sedikit dan biasanya untuk 2-3 orang guru saja. Pengembangan kompetensi guru/tutor PAUD formal dan non formal biasanya sharing antar mereka dengan dana swadaya dan pertemuan rutin di IGTK atau pertemuan rutin PAUD non formal.

Semangat para pendidik dan tutor PAUD dalam mengembangkan dan memajukan PAUD sangat besar, walau mereka masih sifatnya kerja sukarela dan perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten pun masih kurang. Pada umumnya, TK di Kabupaten Maluku Tengah menggunakan Kurikulum TK 2004, namun untuk KB guru menggunakan Kurikulum 2004 yang kompetensinya disesuaikan dengan usia perkembangan anak.

Salah satu aktivitas yang dilakukan dalam pelatihan ini untuk mengetahui pengetahuan awal dan perkembangan pengetahuan setelah pelatihan dilakukan dengan pre dan pos tes. Gambaran hasil kegiatan ini untuk kelompok PAUD adalah bahwa hasil pretest menunjukkan bahwa pengetahuan peserta tentang pengembangan kurikulum PAUD sebesar 52,1%, sedangkan pada post test sebesar 82,7%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pengetahuan sebesar 41,7%. Ini berarti secara umum peserta mengalami suatu perubahan masukkan pengetahuan yang sangat besar (41,7%). Apabila dianalisis, hasil pretest dan post test rata-rata memperlihatkan pemahaman tentang aspek-aspek PAUD semuanya mengalami peningkatan. Diharapkan dengan peningkatan pemahaman tentang pengembangan kurikulum PAUD akan memberikan dampak positif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembuatan silabus maupun pembelajaran PAUD di sekolah masing-masing.

Selain itu, dalam pelatihan ini muncul beberapa pertanyaan yaitu (1) Bagaimana mengatasi anak yang lebih tertarik pada sudut pengembangan/pusat minat?, (2) Setiap tahunnya ada saja anak yg hiperaktif, mainan yg telah diletakkan di sudut sering diberantakkan? Bagaimana menangani anak hiperaktif?, (3) Di Kelompok Bermain masih memakai silabus yang umum seperti TK. Apakah format silabus untuk Kelompok bermain sama dengan TK?, (4) Apakah untuk usia 2-3 tahun jumlah temanya dalam satu semester harus 8?

Dari pelatihan ini juga diperoleh informasi bahwa secara umum guru dan kepala sekolah PAUD formal dan non formal sudah dapat menyusun silabus, SKM dan SKH. Namun untuk PAUD non formal masih tetap memerlukan bimbingan karena pada umumnya mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan tentang PAUD.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN KONAWE (21)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten konawe dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di kab. Konawe. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Di Kab. Konawe, dengan dikeluarkannya peraturan menteri no 22, 23 dan 24 tentang penggunaan KTSP maka Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe mempunyai beberapa langkah kebijakan yang mencakup:

1. Tingkat SD/ MI/ SDLB

- Melakukan sosialisasi tentang KTSP di kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten Konawe dengan melibatkan TIM fasilitator kabupaten yang terdiri atas unsur pejabat Diknas yang terkait dan unsur pengawas mata pelajaran yang telah mengikuti pelatihan KTSP tingkat provinsi maupun tingkat lokal.
- Memfasilitasi dan merekomendasikan terbentuknya KKG (Kelompok Kerja Guru) dan KKPS (Keompok Kerja Pengwas Sekolah) di setiap kecamatan yang dikoordinir langsung oleh kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan.
- Membentuk dan mengangkat Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten yang beranggotakan guru dan unsur pengawas mata pelajaran.

2. Tingkat SMP/MTs/ SLB dan SMA/MA dan SMK

- Melakukan sosialisasi KTSP ke setiap sekolah.
- Mengangkat Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten.
- Mengaktifkan kembali MGMP di sekolah-sekolah.

- Memfasilitasi MKKS.

Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe menetapkan jadwal pelaksanaan KTSP di lingkungan Kabupaten Konawe sebagai berikut.

1. Tingkat SD/MI/ SDLB

Tahun pelajaran 2007/2008 kelas I dan IV

Tahun pelajaran 2008/2009 kelas I, II, IV, dan V

Tahun pelajaran 2009/2010 kelas I, II, II, IV, V, dan VI

2. Tingkat SMP/MTs/SLB

Tahun pelajaran 2007/2008 kelas VII

Tahun pelajaran 2008/2009 kelas VII dan VIII

Tahun pelajaran 2009/2010 kelas VII, VIII, dan IX

3. Tingkat SMA/MA/SMK

Tahun pelajaran 2007/2008 kelas X

Tahun pelajaran 2008/2009 kelas X dan XI

Tahun pelajaran 2009/2010 kelas X, XI dan XII

Gambaran umum tentang Kabupaten Konawe adalah bahwa kab. Konawe memiliki kecamatan sebanyak 30 kecamatan dengan jumlah sekolah beragam yakni, SD/ MI = 389 sekolah, SDLB = 1 sekolah, SMP/MTs = 67 sekolah, SLB = 1 sekolah, SMA/MA = 24 sekolah, SMP Terbuka = 8 sekolah, dan SD-SMP satu atap = 6sekolah

Sejalan dengan kebijakan KTSP, Berbagai permasalahan yang dijumpai berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan KTSP yakni: Jumlah guru masih jauh dari cukup, Sarana prasarana pendukung pembelajaran masih kurang, dan Kemampuan guru dalam memahami KTSP masih rendah.

Berdasarkan uraian di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe sangat menyambut baik dengan dilaksanakannya Bantuan Profesional bagi guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya di wilayah kabupaten Konawe ini. Harapan Dinas terhadap pelaksanaan bantuan profesional yang akan dilaksanakan ini adalah agar nara sumber memberikan penjelasan yang lebih rinci, lugas dan jelas sehingga tim pengembang kurikulum yang akan dibentuk ini dapat menularkanna ke setiap satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Konawe ini.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa pertanyaan diajukan peserta pelatihan. Pertanyaan tersebut antara lain (1) Langkah apa yang harus ambil setelah menetapkan KKM ternyata kondisinya jauh dibawah Standar?, (2) Kreteria kenaikan kelas, kelulusan tidak boleh ada nilai merah, kalau kita kihat apakah Sekolah boleh menetapkan kreteria kenaikan dan kelulusan, (3) Batasaannya berapa kali sekolah dapat merubah KKM kalau ternyata kemampuan siswa tidaktuntas (masalahnya bisa direvisi), (4) Sosialisasi ini sudah berjalan 2 tahun, ditempat kaki dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut sangat terbatas, dan masih sangat kurang sosialisasinya, (4) Mohon kami diberikan literatur yang cukup untuk muatan lokal dan pengembangan diri, (5) Di tempat kami penilainnya bervariasi, yaitu Ulangan harian/ tugas , Ulangan tengah semester dan ulangan terakhir. Bobot Skorinya ketiganya adalah sama. Bagaimana dengan haltersebut. Karena khususnya tugas yang dilakukan di rumah kadang bukan anak sendiri yang melakukan?, (5) Ketentuan KKM di sekolah kami maksimal ada 4 matapelajaran, disamping itu ada ketentuan lain kalau siswa kehadirannya kurang dari 85%, maka anak tersebut tidak naik. Sebetulnya saya kurang terima dengan pernyataan ini, kalau menurut Ibu bagaimana? Dan apakah KKM-nya bisa direvisi, (6)Pada saat kita membuat silabus,

di sana ada indikator. Kemudian di dalam menyusun soal disitu ada dinyatakan menyusun indikator. Guru bingung saat menentukan indikator. Indikator mana yang dituangkan. Apakah indikator silabus apa indikator soal, (7) Mohon perlu dipertegas lagi pada kata operasional khusus atau umum dalam penilaian A,B,C,D (Action, Behavior, Content, dan Degree) atau yang mana ?, (8) Silabus yang baku seperti apa? Karena sampai saat ini belum ada silabus yang baku, (9) Dalam merumuskan Tujuan, apakah harus mengacu pada materi pembelajaran?, (10) Apakah RPP identik dengan SP pada waktu dulu?, (11) Penilaian pada raport dulu menilai aspek dalam mata pelajaran kalau yang sekarang seperti apa?, (12) Apakah dengan KTSP ujian semester ini untuk semua? Pakah boleh dengan sistem blok! Sekolah masih melakukan semester, (13) Pembelajaran tematik seperti apa? Dan bagaimana hubungannya dengan penilaian?, (14) Di Pendidikan Dasar (SD) kalau diberi PR hasilnya selalu baik bagai mana menyikapi seperti ini agar dalam penilaian secara keseluruhan menjadi obyektif. (15) mana yang lebih ideal, apakah ulangan/ujian tengah semester atau ulangan/ujian akhir semester.

Kegiatan pengembangan profesional di Kabupaten Konawe ini secara umum telah dapat mencapai segala hal yang menjadi harapannya yakni seluruh peserta telah memiliki pengetahuan tentang konsep dasar KTSP. Wujud nyata dari keberhasilan kegiatan ini yakni dapat dikembangkannya contoh model KTSP, silabus dan RPP-nya meskipun masih memerlukan penyempurnaan lagi. Semoga peserta kegiatan ini tetap memiliki motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya tentang KTSP, silabus dan RPP. Selain itu, semoga para peserta yang telah memiliki kemampuan secara lengkap mau menularkannya dalam bentuk pendampingan ke sekolah-sekolah yang membutuhkannya.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN TOLI-TOLI (22)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Toli-toli dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Toli-toli dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di kab. Toli-toli. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Peserta kegiatan di Kab. Toli-toli diikuti oleh unsur dari Dinas kabupaten, Pengawas, kepala sekolah, dan guru dari PAUD, Pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dalam kegiatan ini disampaikan pemaparan materi dan workshop pengembangan contoh KTSP. Materi yang dipaparkan mencakup materi kebijakan pengembangan kurikulum, Konsep dasar KBK, Pengembangan KTSP, Silabus dan RPP, model-model Kurikulum yang mencakup model Muatan Lokal, pengembangan diri, pembelajaran tematik kelas awal SD, pembelajaran terpadu IPS dan IPS SMP/MTs, dan penilaian kelas. Sedangkan pada saat workshop peserta berlatih mengembangkan KTSP, silabus, RPP dan model-model yang disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip pengembangan KTSP.

Gambaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah bahwa Pemerintah Kota Tolitoli telah mencanangkan untuk melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan mulai tahun pelajaran 2006/2007 mulai dari jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah akan mencoba untuk melaksanakan implementasi Permen 22, 23 dan 24 yang dimulai dari kelas I dan IV SD atau yang sejenis, kelas VII SMP atau yang sejenis dan kelas VIII pada jenjang pendidikan menengah.

KTSP bisa dikatakan sebagai barang baru khususnya bagi guru-guru meskipun sebetulnya beberapa komponen yang ada pada KTSP merupakan bagian yang sudah biasa dilakukan guru seperti komponen pembelajaran, sarana dan penilaian. Yang menjadi permasalahan bagi lapangan adalah dalam hal penyusunan KTSP, karena biasanya guru hanya menerima naskah kurikulum dan guru tinggal menggunakannya saja. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli menyambut baik adanya sosialisasi penyusunan KTSP melalui kegiatan penataran Pengembangan Profesional Pengembang Kurikulum. Hal ini karena penataran atau sosialisasi yang berhubungan dengan KTSP yang selama ini belum pernah dilakukan di Kabupaten Tolitoli.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli berharap agar melalui pelatihan ini para peserta dapat memahami berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang permen 22, 23 dan 24 serta dapat mencoba untuk menyusun KTSP yang akan digunakan di masing-masing satuan pendidikan.

Kegiatan pengembangan profesional di Kota Tolitoli ini secara umum telah dapat mencapai segala hal yang menjadi harapannya yakni seluruh peserta telah memiliki pengetahuan tentang konsep dasar KTSP.

Sebagian peserta telah pernah mengikuti pelatihan atau penataran tentang KTSP. Informasi tentang KTSP diperoleh dengan cara meminjam atau memfotokopi berbagai bahan tentang KTSP dari sesama teman di kabupaten lain atau dari kota Palu. Kondisi ini membuat sebagian besar waktu hanya dihabiskan hanya untuk memberikan penjelasan, sehingga waktu untuk workshop tersisa sedikit. Namun demikian antusias peserta merupakan berita baik bahwa KTSP di Kabupaten Tolitoli akan berkembang dengan baik. Wujud nyata bahwa peserta mengikuti secara antusias adalah bertambahnya jumlah peserta dari yang ditetapkan. Selain itu beberapa hasil seperti dokumen I KTSP, silabus dan RPP untuk beberapa mata pelajaran meskipun masih belum sempurna telah dicoba disusun oleh peserta.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN BOALEMO (23)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di kab. Boalemo. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Peserta kegiatan di Kab. Boalemo diikuti oleh unsur dari Dinas kabupaten, Pengawas, kepala sekolah, dan guru dari PAUD, Pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dalam kegiatan ini disampaikan pemaparan materi dan workshop pengembangan contoh KTSP. Materi yang dipaparkan mencakup materi kebijakan pengembangan kurikulum, Konsep dasar KBK, Pengembangan KTSP, Silabus dan RPP, model-model Kurikulum yang mencakup model Muatan Lokal, pengembangan diri, pembelajaran tematik kelas awal SD, pembelajaran terpadu IPS dan IPS SMP/MTs, dan penilaian kelas. Sedangkan pada saat workshop peserta berlatih mengembangkan KTSP, silabus, RPP dan model-model yang disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip pengembangan KTSP.

Pada saat pembukaan kegiatan ini, Kepala Dinas P & K Kab. Boalemo dalam sambutannya menyatakan bahwa Workshop Pengembangan Profesional ini akan diikuti dengan kabupaten lain, seperti Kabupaten Gorontalo yang akan melakukan program Pendampingan. Begitu juga, peserta workshop yang telah ditatar ini akan menjadi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang salah satu tugasnya adalah melakukan Pendampingan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Boalemo. Besar harapan biarpun Kab.

Boalemo baru berdiri sekitar 6 tahun, tidak kalah dengan daerah lain dalam mengembangkan program pendidikan. Kepada peserta workshop agar menyerap sebanyak mungkin hasil dari workshop ini.

Dalam pelatihan ini diperoleh informasi bahwa beberapa sekolah jenjang SD dan SMP sudah membuat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) beserta silabus dan RPP-nya untuk berbagai mata pelajaran termasuk Mulok, walaupun masih berbentuk draf dengan kemungkinan revisi/ perbaikan seperlunya. Draft naskah KTSP tersebut cenderung masih berupa adopsi dan perlu penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat. Beberapa komponen Struktur kurikulum, seperti Pengembangan Diri dan Pembelajaran Terpadu IPA/IPS masih perlu penjelasan yang lebih intensif. Pada Pengembangan Diri lebih terpaku pada format program, sementara Pembelajaran Terpadu IPA/IPS merupakan paradigma baru yang masih asing. Di lain pihak, pada pembelajaran tematis di SD dan SLB, tampaknya sudah lebih mengenal konsep/ permasalahannya sehingga tidak mengalami kesulitan saat mengembangkan Model Pembelajarannya. Dalam hal implementasi KTSP ini, Dinas Kabupaten sudah menyiapkan Tim Pengembang Kurikulum yang diharapkan akan melakukan pendampingan di seluruh sekolah wilayah Kab. Boalemo.

Beberapa pertanyaan juga muncul dalam kegiatan ini yaitu ; (1) Bagaimana jika kriteria ketuntasan minimal (KKM) tidak tuntas pada beberapa kompetensi dasar (KD)?, (2) Pada contoh penilaian di mata pelajaran matematika/IPA, diperoleh nilai 80 untuk pemahaman konsep atau hapalan, sementara keterampilan proses atau bernalar hanya memperoleh nilai 20. Apa siswa tetap lulus dengan nilai 20 dalam bernalar?, (3) Apa KD yang sudah tuntas perlu diujikan lagi pada ujian semester?, (4) Bagaimana mengelompokkan siswa sesuai minat dan bakat pada Pengembangan Diri?, (5) Apa yang dimaksud dengan program kegiatan Pengembangan Diri?, (6) Bagaimana dengan guru Pengembangan Diri pada bidang olah raga yang ternyata tidak *kualified* (loyo)?, (7) Bagaimana dengan 'kecakapan hidup' yang tidak sesuai dengan indikator?

Kegiatan pengembangan profesional di kabupaten Boalemo ini secara umum telah dapat mencapai segala hal yang menjadi harapannya yakni seluruh peserta telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasar KTSP. Wujud nyata dari keberhasilan kegiatan ini yakni dapat dikembangkannya contoh model KTSP, silabus dan RPP-nya meskipun masih memerlukan penyempurnaan lagi. Diharapkan, untuk selanjutnya peserta kegiatan ini tetap memiliki motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya tentang KTSP, silabus dan RPP. Selain itu, diharapkan para peserta yang telah memiliki kemampuan lebih untuk dapat mengimbaskannya dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan ke sekolah-sekolah lain.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN BARITO KUALA (24)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Koala dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di kab. Barito Kuala. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Peserta kegiatan di kabupaten Barito Kuala diikuti oleh unsur dari Dinas kabupaten, Pengawas, kepala sekolah, dan guru dari PAUD, Pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dalam kegiatan ini disampaikan pemaparan materi dan workshop pengembangan contoh KTSP. Materi yang dipaparkan mencakup materi kebijakan pengembangan kurikulum, Konsep dasar KBK, Pengembangan KTSP, Silabus dan RPP, model-model Kurikulum yang mencakup model Muatan Lokal, pengembangan diri, pembelajaran tematik kelas awal SD, pembelajaran terpadu IPS dan IPS SMP/MTs, dan penilaian kelas. Sedangkan pada saat workshop peserta berlatih mengembangkan KTSP, silabus, RPP dan model-model yang disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip pengembangan KTSP.

Pelaksanaan pembukaan kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor DPRD tingkat II, yang kemudian dilanjutkan dengan Workshop di SMP Negeri 1 Marabahan, Kab. Barito Kuala. Dalam pembukaannya kepala dinas Kab. Barito Kuala memberikan sambutan antara lain bahwa kebijakan Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala berkaitan dengan Renstra Depdiknas khususnya untuk tahun 2007 ada beberapa tahap program pendidikan yang menekankan pada pengembangan SDM, yaitu: (1) Penuntasan Wajar 9 tahun, (2)

Peningkatan kompetensi guru, (3) Penuntasan Buta Aksara, dan (4) Prasarana Sekolah. Di Kab. Barito Kuala pengalokasian dana untuk program tersebut sudah mencapai 87% dari dana yang tersedia.

Dalam Program Penuntasan Wajar 9 tahun, dana diperoleh dari BOS (Bantuan operasional sekolah), disamping juga dana dari Dinas Pendidikan dan Rekon Pusat. Dana ini juga untuk SD-SMP satu atap baik reguler maupun PLS (Pendidikan luar sekolah).

Berkenaan dengan program peningkatan kualifikasi guru, telah ada semacam insentif bagi guru yang berprestasi sebesar Rp 5 juta. Di samping itu, telah disepakati MOU antara Bupati Kab. Barito Kuala dengan Dinas Pendidikan, mengenai program hingga tahun 2015 untuk meningkatkan kualifikasi guru minimal S1 untuk jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2004 dengan penekanan pada guru SD karena sebagian besar masih berpendidikan terakhir SPG. Pada tahun itu, 44 guru terdaftar mengikuti pendidikan S1/ Akta 4. Angka ini meningkat pada tahun 2007 menjadi 240 guru termasuk dari non PNS.

Dalam hal pengadaan prasarana sekolah, sudah disediakan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 200 juta per sekolah ditambah dari dana rekon Rp 50 juta.

Berdasarkan hasil kegiatan diperoleh informasi bahwa Perkembangan PAUD di Kabupaten Barito Kuala berkembang dengan baik, yaitu 92 TK, 13 RA, 9 KB dan 3 TPA serta beberapa Pos PAUD. Pada umumnya, TK di Kabupaten Barito Kuala menggunakan Kurikulum TK 2004, namun untuk KB guru menggunakan Kurikulum 2004 yang kompetensinya disesuaikan dengan usia perkembangan anak. Para tutor PAUD non formal belum menggunakan Standar Perkembangan Anak Lahir s.d. 6 tahun dan baru mengetahui pada pelaksanaan Pengembangan Profesionalisme Pengembangan Kurikulum PAUD yang diselenggarakan Puskur ini.

Pemerintahpun melalui Direktorat PAUD telah memberikan bantuan dana untuk PAUD non formal sebesar Rp.20 juta di tahun 2006. Pelatihan-pelatihan pengembangan PAUD dari Diknas Pusat bagi guru-guru TK dan PAUD non formal masih sangat sedikit dan biasanya untuk 1-2 orang guru saja. Pengembangan kompetensi guru/tutor PAUD formal dan non formal biasanya sharing antar mereka dengan dana swadaya dan pertemuan rutin di IGTK atau pertemuan rutin PAUD non formal.

Selama ini belum pernah ada pelatihan yang menggabungkan antara guru PAUD formal (TK/RA) dan PAUD non formal. Mereka masing-masing bekerja dan mengadakan pelatihan sendiri-sendiri dengan dana swadaya. Namun, hubungan antara sesama guru PAUD formal dan non formal secara pribadi sangat baik tetapi dengan hubungan persekolahan seperti terjadi persaingan. Pengembangan Profesionalisme Pengembangan Kurikulum PAUD dari Puskur ini merupakan yang pertama kalinya kegiatan pelatihan gabungan antara PAUD formal dan non formal. Perkumpulan PAUD yang ada di Kabupaten Barito Kuala adaya IGTK, KKG dan Himpaudi. Namun, pembinaan terhadap guru PAUD di Kabupaten Barito Kuala lebih kepada beasiswa pendidikan bagi guru. Guru PAUD di Barito Kuala ada sebanyak 40 orang guru TK mendapat beasiswa D2 dan sudah diwisuda.

Meskipun gaji guru TK (bukan PNS) masih rendah, demikian juga dengan honor tutor PAUD non formal yang tidak menentu dan walaupun bantuan dana dari pemerintah untuk para pendidik PAUD non formal masih kurang diperhatikan, namun para pendidik tetap memiliki semangat yang berkobar untuk mencerdaskan anak-anak usia PAUD. Hal ini berbeda dengan TK Negeri Pembina yang segalanya sudah mapan. Setiap tahunnya

selalu mendapat kiriman sarana mainan dan kesempatan pelatihan guru pun rutin ada setiap tahunnya.

Salah satu aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui pemahaman awal dan pemahaman akhir setelah pelatihan adalah dengan pre tes dan pos tes. Khusus untuk PAUD, diperoleh informasi bahwa Hasil pretest menunjukkan bahwa pengetahuan peserta tentang pengembangan kurikulum PAUD sebesar 52,1%, sedangkan pada post test sebesar 82.7%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pengetahuan sebesar 41.7%. Ini berarti secara umum peserta mengalami suatu perubahan masukkan pengetahuan yang sangat besar (41.7%). Apabila dianalisis, hasil pretest dan post test rata-rata memperlihatkan pemahaman tentang aspek-aspek PAUD semuanya mengalami peningkatan. Diharapkan dengan peningkatan pemahaman tentang pengembangan kurikulum PAUD akan memberikan dampak positif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembuatan silabus maupun pembelajaran PAUD di sekolah masing-masing.

Selain itu, Kegiatan pengembangan profesional pendidikan menengah di Kab. Barito Kuala, secara umum sudah mencapai harapan minimal, yaitu para peserta sudah sering mendengar tentang KTSP, sehingga tidak begitu merasa asing lagi. Begitu juga sudah terdapat beberapa bahan dasar untuk pembuatan KTSP beserta silabus dan RPP nya, sehingga tinggal menyamakan persepsi tentang pemahaman mengenai KTSP, silabus, dan RPP. Permasalahan utama terletak pada jumlah mata pelajaran yang banyak sehingga tampak padat dan berpengaruh terhadap pengalokasian dana penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Di samping itu, keberadaan materi Mulok yang selama ini tidak pernah ada pada jenjang SMA, menyebabkan terjadi ketidakseimbangan: sementara jumlah mata pelajaran dianggap terlalu banyak dengan dampak pada alokasi dana, terdapat beberapa mata pelajaran ternyata tidak jelas bahan materi ajarnya dan relevansinya untuk siswa SMA. Untuk itu, perlu segera dipersiapkan tim khusus untuk mengembangkan bahan kajian Mulok pada jenjang SMA.

Dalam kegiatan ini juga timbul berbagai pertanyaan yaitu, (1) KBK belum selesai kok sudah KTSP? Bagaimana dengan buku yang sesuai untuk KTSP?, (2) Berkaitan pembelajaran IPS terpadu, apakah seorang guru harus menguasai IPS secara utuh, padahal guru hanya menguasai satu antara Sejarah, Ekonomi, atau Geografi?, (3) Apakah life skill berarti siswa sudah siap kerja? Apa bedanya dengan SMK?, (4) KTSP tidak berlaku di Malaysia, hanya ada PGSLP, tapi pendidikan cukup sukses? Di Malaysia guru berpendapatan tinggi, dan pendidikan sukses?, (5) Pengembangan diri sebagai bagian dari KTSP, bagaimana pelaksanaannya di sekolah?, (6) KTSP terlalu padat hingga berpengaruh terhadap anggaran sekolah (untuk SMA)?, (7) Program tematis dalam buku teks pada umumnya masih terpilah-pilah? Perlu bahan ajar yang lebih komunikatif?, (8) Mulok (pembibitan jeruk) tidak mendukung wajar 9 tahun jika lulus SD langsung siap kerja? Anak SD kok bisa mengolah pembibitan jeruk karena memegang parang saja tidak bisa? Penekanan pada Mulok nanti lulus SD tidak bisa berhitung?, (9) Tadi dikatakan bahwa masa golden age itu anak usia 0-8 thn dan pembelajarannya sama-sama tematik. Bagaimana menurut ibu agar pembelajaran Tematik di PAUD bisa berkelanjutan di SD sehingga pelajaran terlihat saling berkesinambungan?, (10) Apakah pembelajaran tematik di SD tidak jalan karena kurangnya sosialisasi?, (11) Berikan contoh kalau memang anak yang pernah mengikuti PAUD lebih siap bersekolah dibandingkan dengan anak SD!, (12) Apakah dalam SKM dengan indikator mendengarkan cerita harus kita

tuliskan judul ceritanya?, (13) Apakah untuk usia 2-3 tahun jumlah temanya dalam satu semester harus 8?, (14) Apakah dalam penyusunan SKM model pembelajaran minat boleh memasukkan berbagai aspek pengembangan pada satu area? Misalnya pada area seni dicantumkan indikator dari aspek kognitif, ataupun fisik motorik?

Berbagai hasil diperoleh dari kegiatan ini, khususnya untuk PAUD diperoleh contoh contoh Silabus (Perencanaan Tahunan/Semester, Perencanaan Bulanan, Perencanaan Mingguan dan Perencanaan Harian), LKS dan Penilaian untuk PAUD.

Beberapa informasi juga diperoleh dari kegiatan ini antara lain bahwa dalam implementasi pembelajaran PAUD masih menggunakan kurikulum TK dimana guru menyesuaikan Kompetensi Dasarnya dengan usia anak. Secara umum guru dan kepala sekolah PAUD formal dan non formal sudah dapat menyusun silabus, SKM dan SKH. Namun untuk PAUD non formal masih tetap memerlukan bimbingan karena pada umumnya mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan tentang PAUD.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN SORONG SELATAN (25)

Kabupaten Sorong Selatan beribukota Teminabuan merupakan kabupaten baru pengembangan dari Kabupaten Sorong. Kondisi geografis terdiri dari daratan dengan sebagian besar berupa sungai besar yang mengalir deras. Menuju ke daerah tersebut dapat melalui berbagai alternatif yaitu lewat udara dengan pesawat twin otter, jalan darat selama 9 jam melalui jalan perintis yang baru satu tahun dibuka, melalui kapal laut selama 12 jam, atau melalui sungai selama 7 jam.

Dinas Pendidikan Kabupaten ada dua, yaitu Dinas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Sosialisasi KTSP belum pernah dilakukan di kabupaten ini. Hanya beberapa wakil dari mereka menghadiri pelatihan di Jayapura atau Makasar. Sosialisasi KBK juga sangat sedikit sekali, sehingga pemahaman mereka terhadap kebijakan KTSP tidak merata. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pelatihan.

TPK belum dibentuk tetapi dinas pendidikan telah memiliki dana untuk sosialisasi KTSP terutama untuk tingkat SD. Semua SD telah memperoleh sosialisasi dengan dana APBD dengan nara sumber dari LPMP Jayapura.

Setelah pelatihan dari Puskur Dinas mulai menyusun TPK dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kendalanya adalah Dinas pendidikan Menengah memiliki SMA dan SMK hanya 5 sekolah, sementara untuk tingkat pendidikan dasar jumlah sekolah jauh lebih banya dari pada pendidikan menengah. TPK yang mereka susun masih belum disatukan antara Pendidikan Dasar dan Menengah. Persoalannya yaitu koordinasi di tingkat dinas perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi.

Pemahaman TPK terhadap kebijakan pengembangan KTSP masih sangat kurang, walaupun ada beberapa yang sudah memiliki pengetahuan. Pemahaman peserta dari pendidikan menengah lebih baik dari pada peserta dari pendidikan dasar. Mereka pernah satu kali menerima sosialisasi namun belum melakukan praktek menyusun KTSP. Namun secara umum pemahaman mereka masih sangat minimal.

Kurangnya pemahaman ini disebabkan oleh akses informasi yang kurang, karena merupakan kabupaten baru. Selain itu masih sangat sedikit kegiatan dari Pusat yang dilakukan di daerah tersebut.

Sebagai tindak lanjut dar kegiatan ini maka perlu diberikan pelatihan lebih banyak lagi terutama pemahaman awal tentang kebijakan KTSP bagi TPK . Hal tersebut sangat perlu karena tingkat pemahaman yang masih sangat rendah. Adanya dukungan dana dari Pemda merupakan hal yang harus ditingkatkan karena Kab. Sorong Selatan sedang dalam masa mambangun baik dari segi ekonomi, sosial busaya, dan pendidikan.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME TPK KAB/KOTA  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN (26)

Pangkajene Kepulauan/Pangkep merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki keunikan karena daerahnya meliputi tiga wilayah yang mencakup daratan, kepulauan dan pegunungan, sehingga akan sangat besar dikembangkan potensi daerahnya sebagai aset negara yang dapat dijadikan sumber pengembangan pendidikan. Menurut Kepala Suku Dinas Pendidikan, Pangkep selalu menjadi obyek pengembangan pendidikan, hal ini disebabkan karena wilayahnya yang sangat luas, terdiri dari 119 pulau dengan segala keunikannya. Sesuai dengan Renstra Departemen Pendidikan Nasional dan sejalan dengan program Dinas Pendidikan Kota Pangkep ingin menjadikan Kota Pangkep sebagai Kota Pendidikan untuk itu kegiatan ini sangat berarti dan memberikan motivasi kepada Dinas Pendidikan Kota Pangkep untuk meningkatkan pemahaman Perangkat Dinas, Pengawas, Kepala Sekolah dan guru terhadap kurikulum tingkat satuan pendidikan, peningkatan wawasan pendidikan dan inovasi pendidikan.

Pada tahun 2007/2008 Dinas Pendidikan Kota Pangkep bertekad seluruh sekolah harus siap melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk itu seluruh sekolah harus mampu menyusun seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh sekolah yaitu Dokumen I dan Dokumen II.

KTSP belum disusun oleh sekolah ketika petugas dari Puskur untuk melakukan pelatihan. Pada saat pelatihan peserta menyusun dokumen KTSP bagian I akan tetapi masih sangat sederhana dan disusun asal-asalan tidak berdasarkan analisis konteks daerah. Peserta hanya mengkopi contoh yang sudah ada sehingga dapat disimpulkan bahwa KTSP yang disusun kurang maksimal dalam mengakomodasi potensi dan kondisi serta kebutuhan daerah.

Kegiatan pengembangan profesionalisme pengembang kurikulum di Kota Pangkajene Kepulauan / Pangkep sangat bermanfaat sekali bagi Dinas, Pengawas, Kepala Sekolah serta guru dalam meningkatkan pemahaman terhadap Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan dan implementasinya dalam penyusunan kurikulum sekolah, baik dokumen I yaitu KTSP maupun Dokumen II yaitu Silabus dan RPP. Muatan Lokal. Pengembangan diri.

Untuk itu setiap peserta yang ikut kegiatan tersebut diatas setelah selesai diharapkan mampu melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang berada di Daerah Kota Pangkep dalam menyusun Kurikulum sekolah. Oleh karena itu masih diperlukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil kerja pengembang kurikulum yang berada di Kota Pangkep yang dilakukan oleh tim pusat kurikulum.

Para calon tim pengembang kurikulum di daerah Pangkajene kepulauan belum siap untuk menjadi pelatih dan pendamping daerah dalam menyusun KTSP. Hal tersebut terlihat dari hasil praktek peserta dalam menyusun dokumen dan dalam hal menjelaskan

kebijakan dengan tes lisan untuk menjadi nara sumber. Masih diperlukan lagi pelatihan yang lebih intensif agar betul-betul siap melaksanakan.

TPK Kabupaten Pangkep belum disyahkan dengan SK Bupati. Namun sudah diusulkan kepada Bupati. Program pelatihan mereka belum menganggarkan untuk tahun 2007/2008 ini.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN MERAUKE (27)

Kabupaten Merauke merupakan kabupaten yang terletak di ujung bagian selatan Provinsi Papua, berbatasan dengan Negara Papua New Gini. Penduduk pendatang berasal dari program transmigrasi pemerintah sekitar tahun 1980-an. Penduduk asli dan pendatang jumlahnya berimbang. Bahkan penduduk pendatang sudah banyak yang berprofesi sebagai tenaga pendidik di setiap satuan pendidikan. Tidak ada konflik antar etnis, jika ada hanya konflik masyarakat biasa.

Pendidikan di Kabupaten Merauke ditangani oleh tiga dinas yaitu untuk TK dan SD di bawah Dinas Pendidikan Dasar, SMP dan SMA dan yang sederajat dibawah Dinas Pendidikan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah (paket A, B, C) di bawah Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dinas telah menetapkan tim pengembang kurikulum daerah yang telah diusulkan kepada pemerintah daerah, akan tetapi SK penetapan dari Kabupaten belum terbit. Dinas Pendidikan menengah telah mengusulkan kepada Pemda untuk Tim Pengembang Kurikulum SMP, sedangkan Tim Pengembang Kurikulum SMA sedang disusun.

Dinas pendidikan pada tahun 2007 telah mengalokasikan dana untuk kegiatan sosialisasi dan penyusunan KTSP untuk seluruh jenjang pendidikan. Pelatihan penyusunan KTSP difasilitasi oleh LPMP sebagai nara sumber. Pelatihan KTSP dilaksanakan untuk sekolah dan seluruh mata pelajaran. Pelatihan khusus untuk mata pelajaran belum pernah dilakukan.

Seluruh sekolah SMP dan SMA dan yang sederajat telah memperoleh sosialisasi KTSP. Pelatihan lebih ditekankan kepada penyusunan KTSP, silabus, dan RPP. Informasi secara detail seperti bagaimana menyusun KTSP dengan analisis konteks, menyusun muatan lokal, pemilihan dan penentuan pengembangan diri dan model-model kurikulum lainnya tidak diberikan secara detail karena target penyusunan KTSP. Hanya saja sosialisasi KTSP masih dirasakan belum menyentuh seluruh sekolah yang ada di dari jenjang pendidikan dasar dan menengah di wilayah Kabupaten Merauke. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang KTSP juga berlaku untuk madrasah di setiap jenjang dan satuan pendidikan yang berada dalam binaan Dinas atau kanwil Departemen Agama setempat.

Departemen Agama kurang aktif dalam menyiapkan sekolah Madrasah untuk menyusun KTSP. Oleh karena itu, atas inisiatif dari Dinas Pendidikan, Madrasah juga sering diikuti dalam pelatihan KTSP.

Sebagian besar sekolah pada tahun ajaran baru 2007/2008 melaksanakan KTSP. Dinas tidak menetapkan kapan sekolah harus melaksanakan KTSP, pelaksanaan diserahkan kepada sekolah. Jika mereka siap, maka dinas memberikan masukan tentang penyempurnaan dokumen dan hal teknis lainnya.

Peserta yang diundang bervariasi kemampuan dan pemahamannya. Sebagian dari mereka telah mahir dan siap menjadi tim pengembang akan tetapi sebagian peserta belum pernah memperoleh sosialisasi. Hal tersebut menyebabkan agak kesulitan dalam memberikan pelatihan. Tujuan kegiatan adalah melatih para tim pengembang kurikulum daerah maka pelatihan lebih banyak dilakukan dengan memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi dari kebijakan-kebijakan yang telah mereka fahami

sebelumnya. Mereka masih harus dibimbing secara pelan-pelan. Apa yang mereka peroleh selama pelatihan dan workshop yang dilakukan masih dalam taraf sosialisasi, belum sampai pada pemahaman sebagai seorang pendamping sekolah untuk menyusun KTSP

Pemahaman peserta tentang KTSP beragam. KTSP yang disusun masih sangat sederhana. Silabus sudah dimiliki oleh sebagian peserta, tetapi terdapat guru yang belum memiliki silabus. Silabus yang disusun sendiri belum mereka miliki, karena standar isi mereka belum pernah memperolehnya.

Muatan lokal mereka yaitu pendidikan HIV Aids. Muatan lokal belum disusun SK, KD, Silabus, dan RPP-nya. Pendidikan bermuatan life skill juga kurang dipahami. Mereka kurang mengerti apa saja yang dimaksud dengan life skill. Hal tersebut menyebabkan mereka kesulitan dalam memasukkan life skill ke dalam silabus mereka. Panduan life skill juga mereka tidak memilikinya.

Dukungan dari Pemerintah daerah sangat baik. Pemerintah daerah, terutama Bupati, sangat perhatian dengan kemajuan bidang pendidikan. Dukungan agar sekolah maju diberikan dengan dialokasikan dana khusus untuk pendidikan. Dana untuk pelatihan dan penyusunan KTSP telah dianggarkan pada tahun 2007.

Guru yang ingin maju diberikan fasilitas dengan memberikan kemudahan mengikuti pelatihan yang dilaksanakan baik di provinsi maupun di Pusat. Walaupun dalam undangan akomodasi dan transpor ditanggung oleh panitia, tetapi bupati memberikan transpor dan akomodasi dari anggaran daerah.

Setiap guru dibelikan sepeda motor atau dibuatkan rumah jika belum memilikinya. Guru yang ingin melanjutkan pendidikannya, diberikan fasilitas gratis dan diundang tutor dari Jayapura dengan dana daerah. Setiap guru juga sudah memperoleh tunjangan profesi dan besarnya disesuaikan dengan pangkat/golongan. Golongan III sebanyak Rp450.000,.

Siswa yang berprestasi disekolahkan kemanapun siswa mendaftar. Terutama di Wilayah Jawa atau Sumatera dan diberi beasiswa sampai selesai pendidikan.

Dinas Pendidikan dasar dan menengah bekerja sama dengan yayasan TOFI (TIM Olimpiade Fisika Indonesia) melalui Yohanes Surya. Kerja sama dalam bidang fisika dan matematika dengan cara pelatihan baik untuk siswa maupun guru. Siswa yang berprestasi di bidang fisika akan dibawa ke Jakarta dan diberi bimbingan khusus untuk menjadi tim olimpiade.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT (28)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kab. Kotawaringin Barat dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kab. Kotawaringin Barat dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di kab. Purworejo. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Pendidikan di Kabupaten ini sudah cukup maju dibanding dengan daerah di sekitarnya. Dinas Pendidikan sebagai instansi yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan memiliki perhatian yang sangat baik terhadap kemajuan pendidikan di wilayahnya. Perhatian Pemerintah Daerah juga sangat baik dengan memberikan anggaran yang cukup memadai untuk mengembangkan pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat telah merencanakan melakukan sosialisasi KTSP kepada seluruh satuan pendidikan di tahun anggaran 2007 ini.. Dinas mengharapkan paling tidak seluruh sekolah telah melaksanakan KTSP di tahun 2008 yang dimulai dari kelas I dan IV SD, VII SMP, dan X SMA. Pada tahun 2007 ini diharapkan sekolah mulai mengembangkan KTSP agar pelaksanaan tahun 2008 dapat dimulai. Kesulitan dan kendala yang dihadapi bukan menjadi hambatan bagi sekolah tetapi dapat dijadikan tantangan untuk maju. Karena Kepala Dinas percaya bahwa tanpa memulai, maka tidak akan tahu apakah mampu atau belum. Dengan memulai akan ditemukan kesulitan yang akhirnya menuju kepada titik terang akan pemahaman dari kebijakan dan pelaksanaannya.

Keseriusan dari Dinas Pendidikan juga ditunjukkan dengan telah dibentuknya TPK kabupaten. TPK Kab. Kotawaringin Barat dilegalkan dengan SK dari Kepala Dinas Pendidikan dan baru diusulkan kepada Kepala Pemerintah Daerah. Tim Pengembang Kurikulum Kab. Kotawaringin Barat dikukuhkan dengan SK dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 421/390/408.37.04/2007 yang anggotanya meliputi unsur Dinas Pendidikan, Pengawas TK/SD, Pengawas SMP, Pengawas SMA, Pengawas SMK, Kepala Sekolah, Ketua/Pengurus MGMP, Ketua/Pengurus KKG, Guru Inti dan Kepala Sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan SMK. Tugas dari Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan antara lain: (1) Merencanakan penyelenggaraan sosialisasi/Pelatihan KTSP sesuai dengan satuan pendidikannya, (2) Melaksanakan bimbingan penyusunan draft KTSP, asistensi review dan revisi draft KTSP yang disusun oleh satuan pendidikan sekolah, dan (3) Melaksanakan asistensi finalisasi dan evaluasi KTSP yang disusun oleh satuan pendidikan sekolah

Mekanisme dan jadwal asistensi review Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk masing-masing satuan pendidikan telah ditetapkan juga di dalam surat keputusan yang sampai saat ini sudah pada tahap finalisasi/pengeuhan oleh kepala Dinas.

Dinas berharap untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) belum diadakan sosialisasi KTSP, karena tidak ada di dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum Permendiknas No. 22 tahun 2006.

Kotawaringin Barat sudah menyusun KTSP dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK dan sudah pada tahap finalisasi. Dinas berharap kepada para peserta bimbingan tetap bersemangat mengikuti bimbingan dan dalam waktu tiga hari ini KTSP yang sudah pada tahap finalisasi dari masing-masing peserta nanti dibawa sebagai bahan referensi bimbingan dan dikonsultasikan kepada bapak/ibu nara sumber mungkin ada hal-hal yang perlu mendapat perbaikan.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KABUPATEN SAMBAS (29)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di Kabupaten Sambas. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Kabupaten Sambas terletak di sebelah utara Kota Pontianak yang dekat dengan perbatasan dengan Malaysia. Kabupaten ini kelihatan sedang nampak sibuk membangun baik dari segi fisik maupun infrastruktur lainnya. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah menjadikan kabupaten mulai menata diri sesuai dengan kemampuan sendiri. Dalam bidang pendidikan, sudah mulai ada keinginan yang kuat dari Pemda untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Sebagai kota tua di Kalimantan Barat dan juga tidak jauh letaknya dengan perbatasan negara lain, maka selayaknya kabupaten ini menjadi cermin bagi wilayah lain untuk membangun manusia.

Niatan baik dalam mengemangkan dunia pendidikan terlihat dari semangat pelaksanaan pendidikan di tingkat dinas. Dengan motivasi yang tinggi mereka menyediakan layanan kepada sekolah segala keperluan dan kebutuhan sekolah. Dengan demikian akan berdampak baik pada kualitas pendidikan dan akhirnya akan meningkatkan kualitas manusia secara individual. Niatan baik tersebut juga nampak dalam proses pelaksanaan kegiatan bantuan profesional di kabupaten ini. Lancarnya kegiatan dan peran serta yang aktif dari peserta merupakan salah satu keunggulan dan modal dalam bidang pendidikan.

Peserta menganggap bahwa dengan pelatihan ini merupakan kesempatan terbesar dalam hidup mereka karena sangat jarang petugas pusat datang ke wilayah mereka untuk memberikan materi pelatihan ataupun kegiatan yang lainnya. Mereka menganggap dengan pemberian materi dari pusat sangat berbeda dengan yang pernah mereka ikuti di provinsi maupun di Pusat. Mereka menganggap bahwa materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan langsung dilakukan dengan praktek. Biasanya mereka memperoleh pelatihan namun prakteknya sangat sedikit bahkan tidak dievaluasi.

Dengan adanya kegiatan ini maka mereka semakin mantap untuk melangkah melaksanakan KTSP. Pada tahun 2007 ini semua SMP dan MTs telah mulai melaksanakan KTSP mulai tahun ajaran 2007/2008. Untuk SMA dan SMK baru sebagian yang telah mulai melaksanakan KTSP mulai tahun ajaran 2007/2008. Tingkat kelulusan UN SMA dan SMK rendah di Kab. Sambas, yaitu sekitar 75%. Tahun 2008/2009 diharapkan semua satuan pendidikan telah mulai melaksanakan KTSP.

Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Sambas belum terbentuk pada saat kegiatan dilaksanakan. Setelah memperoleh informasi bahwa pemda harus membentuk TPK maka mereka berencana untuk membentuknya. Selain itu mereka ingin membuat program agar pelaksanaan KTSP lebih baik dari apa yang diharapkan.

Tindak lanjut dari kegiatan di Sambas yaitu masih perlu pelatihan secara intensif bagi para TPK yang dipilih agar lebih menguasai dan mampu mendampingi satuan pendidikan mengembangkan KTSP. Pemda juga harus lebih komit dalam mengalokasikan dana APBD mereka untuk meningkatkan kemajuan pendidikan di sana.

EXECUTIVE SUMMARY  
KEGIATAN BANTUAN PROFESIONAL TIM PENGEMBANG KURIKULUM (TPK)  
TAHUN 2007 DI KOTA TIDORE (31)

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berimplikasi pada proses pengembangan dan implementasi kurikulum dalam hal pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan/atau sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan Peraturan Mendiknas nomor 22, tentang standar isi, nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 24 tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Implikasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah yaitu pemberian peran yang seluas-luasnya kepada daerah dan sekolah sebagai lembaga profesional yang mandiri dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Tidore dan jajaran sekolah perlu mempersiapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional kurikulum, antara lain adalah penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yang mencakup antara lain perangkat operasional, dan strategi pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, seperti penyusunan perencanaan, proses pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian yang dikelola secara profesional oleh jajaran Dinas Pendidikan Kota Tidore dan sekolah.

Pusat kurikulum sebagai salah satu Pusat yang berada pada Badan penelitian dan Pengembangan Depdiknas mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kurikulum melakukan pelatihan dan workshop di Kota. Tidore. Tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan (1) sejumlah tenaga pengembang Kurikulum Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendampingan kepada sekolah-sekolah di daerahnya, dan (2) contoh-contoh KTSP.

Kota kecil yg penduduk tidak banyak dan tahun lalu daerah ini dapat penghargaan kota kecil terbesih. Kota tidore memiliki ciri khas yaitu memiliki garis pantai yang panjang dan wilayahnya sebagian besar yaitu laut. Berdasarkan analisis konteks pada saat akan menyusun KTSP ditemukan informasi bahwa kota ini memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Hal ini dapat menjadi kekuatan daerah tersebut sebagai sumber belajar dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan sekolah.

Kota Tidore sangat jarang menerima sosialisasi KTSP sehingga pada saat kegiatan dilaksanakan pemahaman peserta belum memadai dan masih dalam taraf sosialisasi pemahaman kebijakan. Hal tersebut karena daerah hanya memiliki dana yang lebih sedikit dibanding daerah lain dalam provinsi yang sama. Namun demikian, dengan berbagai upaya, dinas menetapkan pada tahun 2007/2008 semua jenjang diharapkan sudah mulai menyiapkan pelaksanaan kurikulum sekolah dan pada tahun 2008 semua sekolah telah melaksanakannya.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Filosofi KTSP harus dikelola dengan baik agar dapat menjiwai segala proses yang berlangsung di sekolah semua menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan. Semua tujuan tersebut telah termuat dalam kebijakan, dan tugas sekolah yaitu melaksanakannya sesuai dengan karakteristik sekolah. Jika hal ini berjalan

dengan sangat baik maka hasilnya akan sangat baik pula. Akan tetapi perlu usaha dari semua pelaksana pendidikan terutama guru sebagai garda depan pendidikan dan berkomunikasi secara langsung dengan siswa.

Dalam pelatihan ini dinas menginginkan semua peserta memanfaatkan momen ini dengan baik karena merupakan kesempatan yang sangat langka dari segi kesempatan dan biaya. Jika tidak bisa memanfaatkan maka akan sangat disayangkan karena usaha dari Puskur sudah sangat baik. Hal ini karena semua menyadari bahwa penyusunan KTSP merupakan kewajiban daerah dan sekolah untuk mengembangkannya. Adanya Puskur di kegiatan ini menjadi sumber yang sangat baik, apalagi membawakan bahan dalam bentuk CD yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Bahan hanya dapat dimanfaatkan oleh yang mau saja. Oleh yang mau belajar dan berkeinginan untuk maju.

Trend adanya perubahan pendidikan 10 th terakhir ditambah adanya otonomi daerah dengan demikian urusan pendidikan/kurikulum, pembelajaran yg dibungkus suatu kurikulum 10 th lalu ini masih menjadi mimpi, utk sekarang menjadi wewenang satuan pendidikan

Tantangan yg nyata dalam aspek sumber daya. Tidak semua orang mampu berpikir secara analisis secara baik dg demikian diperlukan penggodokan berlatih terus menerus utk dalam rangka KTSP. Pimpinan sekolah menjadi faktor terbesar dalam kelangsungan pendidikan di sekolah. KTSP merupakan produk dari proses suatu interaksi. Kekeliruan proses akan menjadi preseden buruk.